

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan



Kepulauan Riau

PADA MASA DOLLAR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1999

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

KEPULAUAN RIAU PADA MASA DOLLAR

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1999**

KEPULAUAN RIAU PADA MASA DOLLAR

Tim Penulis : Sri Sutjiatiningsih
Gatot Winoto

Penyunting : M. Sanggupri Bochari

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal
Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta 1999

Edisi 1999

Dicetak oleh : **CV. ILHAM BANGUN KARYA**

ISBN 979-9335-08-6

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan berbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Proyek IDSN), dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu, para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyek IDSN itu tidak luput dari berbagai kelemahan: isi, bahasa, maupun penyajiannya, namun kami meyakinkan pembaca bahwa kesalahan dan kelemahan itu tidaklah disengaja. Untuk itu, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik, saran perbaikan terhadap karya-karya Proyek IDSN ini. Kritik dan saran itu tentu akan sangat berguna untuk memperbaiki karya-karya proyek ini.

Kepada para penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung

maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya
Proyek IDSN sebagaimana adanya ditangan pembaca,
kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Juli 1999
Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'IGN. Anom', written over a horizontal line.

IGN. Anom
NIP. 130353848

PENGANTAR

Kepulauan Riau Pada Masa Dollar ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999/2000.

Buku ini menguraikan tentang gambaran umum daerah penelitian, kondisi daerah Riau pada masa demokrasi liberal hingga terbentuknya propinsi, kondisi sosial ekonomi masyarakat kepulauan Riau pada masa dollar dan dampak kebijakan moneter Oktober 1963 di kepulauan Riau.

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk menambah informasi kesejarahan mengenai peran serta masyarakat pada masa berlakunya uang dollar di kepulauan Riau serta dalam perjalanan bangsa pada umumnya.

Diharapkan dengan terbitnya buku ini dapat menambah khasanah sejarah Indonesia dan memberi informasi yang memadai bagi generasi penerus yang berminat serta untuk meningkatkan kesadaran sejarah bagi masyarakat pada umumnya.

Jakarta, Juli 1999

**Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional**



Wiwi Kuswiah
NIP. 131125902

KATA PENGANTAR

Sejarah mengandung dua pengertian, yakni masa lampau dan rekonstruksi tentang masa lampau. Masa lampau sebenarnya hanya terdapat dalam ingatan seseorang atau pada orang-orang yang pernah mengalaminya. Kenyataan ini baru bisa diketahui oleh orang lain apabila diungkapkan kembali dengan adanya komunikasi dan dokumentasi dimana data dan informasi yang ada dimodifikasi menjadi gambaran tentang peristiwa masa lalu itu. Proses itu disebut rekonstruksi sejarah. Jadi, sejarah berarti hanya bisa dilakukan dalam lingkup rekonstruksi masa lampau atau yang biasa disebut sebagai historiografi.

Mengingat bahwa sejarah sebagai peristiwa masa lampau dan rekonstruksi masa lampau yang memiliki kegunaan: instruktif, inspiratif, dan edukatif maka peranan sejarah lokal menjadi sangat penting, tidak hanya bagi rambu-rambu generasi dalam sepak terjangnya, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai rekonstruksi masa lampau yang pada gilirannya (jika memenuhi persyaratan) dapat mewarnai jajaran sejarah nasional. Dengan demikian generasi muda tidak hanya mengetahui sejarah nasional, tetapi juga apa yang pernah terjadi di daerahnya (sejarah lokal). Dan naskah ini adalah usaha yang konkrit terhadap penulisan sejarah lokal.

Terwujudnya naskah ini berkat kerjasama berbagai pihak. Untuk itu, sudah sepatutnya jika mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak, ikut mendukung terwujudnya naskah ini.

“Tak ada gading yang tak retak” barangkali ungkapan yang sesuai untuk mengakhiri kata pengantar ini. Namun demikian, kami berharap semoga naskah ini bermanfaat bagi kita semua.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktorat Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latabelakang dan Masalah	1
1.2 Tujuan	6
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Metode Penelitian	6
Bab II Gambaran Umum Daerah Penelitian	
2.1 Sekilas tentang Riau	11
2.1.1 Letak dan Keadaan Alam	11
2.1.2 Kependudukan	12
2.1.3 Pendidikan	12
2.1.4 Perekonomian	13
2.1.5 Sejarah	14
2.2 Sekilas tentang Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ...	15
2.2.1 Letak dan Keadaan Alam	15
2.2.2 Kependudukan	16
2.2.3 Pendidikan	17
2.2.4 Perekonomian	18

2.2.5	Agama	19
2.2.6	Sejarah	19
2.3	Masyarakat dan Kebudayaan	22
Bab III Kondisi Daerah Riau pada Masa Demokrasi Liberal Hingga Terbentuknya Propinsi		
3.1	Pengantar	35
3.2	Daerah Riau pada Masa Demokrasi Liberal	35
3.3	Daerah Riau Masa Demokrasi Terpimpin.....	40
3.4	Pembentukan Propinsi Riau	43
Bab IV Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kepulauan Riau pada Masa Dollar		
4.1	Pengantar	55
4.1.1	Pola Jaringan Sosial	56
4.2	Pola Jaringan Perdagangan Masyarakat Kepulauan Riau	63
4.3	Penggunaan Mata Uang Rupiah Kepulauan Riau Sebagai Alternatif Pengganti Dolar	66
Bab V Dampak Kebijakan Moneter Oktober 1963 di Kepulauan Riau		
5.1	Reaksi Pemerintah Daerah Kepulauan Riau	73
5.2	Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat	75
5.3	Pencabutan Kebijakan Moneter	82
Bab VI Kesimpulan		91
Daftar Pustaka		95
Lampiran		97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Riau¹⁾, sebagaimana dikatakan oleh Dahril (1995) memang unik. Keunikannya itu bukan saja terletak pada bentuk, ukuran, letak geografis, sumber daya alam, sosial budaya masyarakat, tetapi juga latar belakang sejarahnya. Untuk yang disebutkan terakhir ini Suparlan (1995), berdasarkan catatan Suwardi MS (sejarawan Riau), mengatakan bahwa kronologi Sejarah Riau terbagi dalam tujuh masa. Ketujuh masa itu ialah : (1) masa pengaruh Kerajaan Sriwijaya yang berlangsung sampai dengan abad ke-13. Kerajaan Muara Takus diduga merupakan kerajaan yang mewakili Sriwijaya dalam menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Riau pada waktu itu. Kerajaan-kerajaan kecil tersebut adalah kerajaan-kerajaan Melayu yang kemudian berhasil bebas dan berdiri sendiri setelah runtuhnya kekuasaan Sriwijaya; (2) masa kemerdekaan kerajaan-kerajaan Melayu, yaitu suatu masa dimana kerajaan-kerajaan Melayu Riau tidak dikuasai oleh suatu kekuasaan yang lebih besar dari suatu kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu ialah: a. Bintan-Tumasih (di Kepulauan Riau), dan Malaka (di Semenanjung Melayu), b. Kandis-Kuantan, c. Gasib-Siak, d. Kritang-Indragiri, e. Rokan, f. Segati, g. Pekan Tua dan h. Andiko Nan 44-Kampar; 3) masa perkembangan kerajaan-kerajaan kecil Melayu tersebut berada di bawah kekuasaan Kerajaan Melaka, yang kemudian

direbut oleh Kerajaan Johor. Sedangkan kerajaan Andiko Nan 44 Kampar dan Kuantan berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Pagarruyung-Minangkabau; 4) masa kepunahan kerajaan-kerajaan Melayu, yaitu suatu masa dimana sebagian besar kerajaan Melayu tersebut mengalami kepunahan yang belum diketahui sebab-sebabnya. Kerajaan-kerajaan itu adalah: Kandis, Segati, Pekan Tua, dan Gasib; 5) masa munculnya kerajaan-kerajaan besar, seperti: Siak Sri Indrapura, Indragiri dan Pelalawan; 6) masa Kerajaan Riau-Lingga, yaitu suatu masa munculnya Kerajaan Riau-Lingga yang kemudian menjadi jaya menggantikan Johor, namun kemudian menghilang dan punah kekuasaannya dengan berkuasanya Belanda di Indonesia dan 7) menjelang kemerdekaan Indonesia yaitu suatu masa dimana terdapat kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak Sri Indrapura, Indragiri, Pelalawan, Rokan, Serigigi, Kampar Kiri, dan Kuantan. Pada masa sekarang (1999) kerajaan-kerajaan tersebut sudah tidak ada lagi. Namun demikian gelar-gelar kebangsaan masih digunakan orang-orang yang menjadi keturunan mereka dan gelar-gelar tersebut antara lain "teungku".

Pada zaman Belanda berkuasa, ekonomi dan politik wilayah Riau berpusat di Tanjungpinang. Daerah Riau sendiri pada waktu itu berkedudukan sebagai kabupaten. Pada tahun 1958 ia berubah menjadi propinsi yang beribukota di Pekanbaru (Suparlan, 1995: 42).

Berdasarkan kronologi itu, maka kerajaan-kerajaan Melayu Riau tidak semuanya menjadi besar. Hanya beberapa saja yang kemudian berhasil menjadi kerajaan besar. Satu di antaranya adalah Kerajaan Riau Lingga²⁾ yang berada di Kepulauan Riau. Bahkan kerajaan ini sebagaimana disebutkan di atas, pernah menggantikan Johor yang jaya. Ini artinya, bahwa Kepulauan Riau pun mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan itu antara lain karena wilayahnya langsung berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja) dan sebagian besar (96%) terdiri atas perairan dan ribuan pulau³⁾.

Di samping itu kepulauan Riau, ibukota Tanjungpinang pernah menjadi ibukota Propinsi Riau dan adanya kerajaan yang pernah menggantikan kejayaan Johor. Dan yang sangat menarik adalah di Kepulauan Riau ini pernah diberlakukan mata uang asing (Singapura/Malaysia) sebagai alat tukar yang sah baik pada masa kolonial Belanda maupun masa kemerdekaan. Bahkan, sebelum peristiwa konfrontasi para pegawai negeri (pegawai pemerintah Indonesia) yang ada di daerah Kepulauan Riau ini digaji dengan mata uang asing (dollar). Ini adalah suatu perkecualian yang tidak terjadi pada pegawai negeri manapun yang ada di Indonesia.

Dollar, sebagaimana kita ketahui, nilainya lebih tinggi dibandingkan rupiah. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika pada waktu itu orang luar menilai masyarakat Kepulauan Riau sebagai masyarakat yang tingkat hidupnya berkecukupan, sehingga tidak mengherankan jika pada masa itu orang dari Kepulauan Riau diperlakukan “agak khusus”.

Gambaran tentang Kepulauan Riau yang demikian makmur itu pada gilirannya membuat orang-orang dari berbagai daerah berdatangan untuk mengadu nasib (merubah tingkat kehidupan yang lebih baik). Konon, pada masa itu tersiar kabar bahwa seorang pegawai negeri, baik sipil maupun ABRI yang ditugaskan ke Tanjungpinang (ibukota Kabupaten Kepulauan Riau) merasa bagaikan mendapat “durian yang jatuh” atau “ketiban rezeki nomplok”.

Namun, tahun-tahun sesudah itu, sejak dollar tidak diperlakukan lagi sebagai alat tukar yang resmi, kepulauan Riau khususnya Tanjungpinang, seakan-akan tenggelam oleh pesatnya perkembangan Batam. Karenanya Tanjungpinang yang dahulu sangat terkenal kini banyak orang yang tidak tahu persis dimana letaknya. Padahal, Batam pada waktu itu belum apa-apa dan masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Bahkkan dapat dikatakan masih berupa hutan belukar.

Kepualaan Riau mulai punyai gaung lagi sejak disepakatinya kerjasama dalam rangka menumbuhkan ekonomi di

tiga kawasan yang kemudian terkenal sebagai Pertumbuhan Segi Tiga Singapura, Johor dan Riau (Sijori). Berkenaan dengan Sijori ini Mubyarto (1993) mengatakan bahwa daya tarik Riau sepertinya belum cukup bagi para pendatang dari luar. Oleh karena itu, sejak tahun 1988 Pemerintah Pusat “menciptakan” lagi sebuah pusat pertumbuhan baru yang langsung berhadapan dengan Singapura, yaitu di wilayah Kepulauan Riau. Dan ini digambarkan oleh Mubyarto sebagai pengembalian hubungan ekonomi yang amat erat yang telah terbina lebih dari satu abad sebelumnya, karena pada zaman penjajahan dan tahun-tahun awal kemerdekaan sampai masa konfrontasi 1963--1966, ekonomi Riau Kepulauan “menyatu” dengan ekonomi Singapura/Malaysia. Malahan, Ahmad (1985) menyebutkan kerjasama masyarakat di kawasan itu sebenarnya telah berlangsung ratusan tahun yang lalu. Dan ini sangat beralasan karena jika kita lihat latar belakang sejarahnya, mereka masih satu keturunan. Mereka mengakui bahwa Nila Utama yang bergelar “Sri Tri Buana” yang datang dari Bukit Siguntang Mahameru di Palembang (Sriwijaya) adalah sebagai cikal bakal raja-raja Melayu Riau dan kawasan Semenanjung.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pada masa yang silam, masyarakat Kepulauan Riau mengalami kemakmuran, khususnya pada masa kolonial Belanda dan tahun-tahun awal kemerdekaan hingga tahun 1963. Karena pada masa itu dollar (Malaysia dan Singapura) yang nilainya lebih tinggi daripada rupiah menjadi alat bayar (tukar) yang resmi. Namun, sejak pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter pada 15 Oktober 1963⁴⁾, yang intinya melarang penggunaan mata uang dollar Singapura/Malaysia di Kepulauan Riau, dapat dikatakan tatanan ekonomi masyarakat daerah Kepulauan Riau yang telah berlangsung berabad-abad menjadi berubah total. Seluruh jaringan perdagangan antara masyarakat Singapura/Malaysia dan masyarakat Kepulauan Riau dilarang oleh pemerintah Indonesia. Begitu pula pemakaian mata uangnya, sehingga seluruh kebutuhan sehari-hari masyarakat Kepulauan Riau didatangkan dari Jakarta. Dapat dikatakan pada waktu itu (15 Oktober 1963) pemerintah Indonesia telah

mengambil langkah atau keputusan yang amat dramatis di bidang moneter untuk masyarakat Kepulauan Riau.

Sebelum adanya kebijakan itu masyarakat Kepulauan Riau dapat menjual hasil-hasil pertanian terutama karet dan ikan ke Singapura tanpa harus dibatasi oleh peraturan-peraturan kepabeanan. Begitu pula sebaliknya, masyarakat Singapura dapat menjual secara bebas bahan-bahan kebutuhan pokok kepada penduduk Kepulauan Riau. Secara politis (berdasarkan *Traktat of London* tahun 1824) ketiga daerah itu memiliki perbedaan. Singapura dan Malaysia berada dalam kekuasaan kolonial Inggris, sedangkan Kepulauan Riau dan daerah-daerah nusantara lainnya dikuasai oleh Kolonial Belanda. Namun secara ekonomi ketiga daerah ini tidak berbeda, karena mata uang dolar Singapura/Malaysia tetap dinyatakan sebagai alat tukar yang sah di daerah tersebut. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya setelah Indonesia merdeka hal inipun tetap berlangsung hingga tahun 1963.

Sebagaimana kami sebutkan di atas bahwa bagi masyarakat Kepulauan Riau masa-masa dolar itu merupakan jaman keemasan (kemakmuran). Mereka baik nelayan, buruh, pegawai pemerintah, swasta, jasa maupun bidang lainnya, mengaku bahwa pada masa itu segalanya seakan-akan sangat mudah dan menyenangkan, sehingga sulit untuk dilupakan dari ingatannya.

Walaupun masa itu telah berlalu, kami pikir itu adalah sesuatu yang unik dan karenanya sangat menarik untuk diteliti, karena bagaimanapun itu adalah fenomena sejarah, khususnya sejarah lokal. Masalahnya adalah data dan informasi yang mengenai masa yang disebut sebagai “masa dollar” belum sepenuhnya diketahui secara mendalam. Sehubungan dengan itu, pertanyaan-pertanyaan berikut ini adalah 1) bagaimana kondisi sosial dan ekonomi yang sebenarnya yang dialami oleh masyarakat Kepulauan Riau pada masa dollar; 2) mengapa pemerintah Republik Indonesia tetap memberlakukan mata uang dolar (asing) Singapura/Malaysia di daerah Kepulauan Riau, atau dengan kata lain peristiwa-peristiwa apa yang melatarbelakangi pemberlakuan mata uang asing itu.

1.2 Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan apa yang melatarbelakangi pemberlakuan mata uang pemerintah Indonesia (rupiah), dan bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kepulauan Riau, termasuk jalinan relasi sosial dan ekonomi mereka dengan masyarakat Singapura dan Malaysia.

Data dan informasi yang tertuang pada naskah (hasil penelitian) yang berisi tentang dinamika masyarakat Kepulauan Riau ini, tidak hanya penting bagi pembinaan dan pengembangan masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi, juga (yang tidak kalah pentingnya) adalah apa yang pernah dialami oleh masyarakat Kepulauan Riau tidak hilang begitu saja (tanpa makna). Dan yang terakhir adalah sebagai sumbangan masyarakat Kepulauan Riau terhadap sejarah lokal yang pada gilirannya dapat mewarnai sejarah nasional.

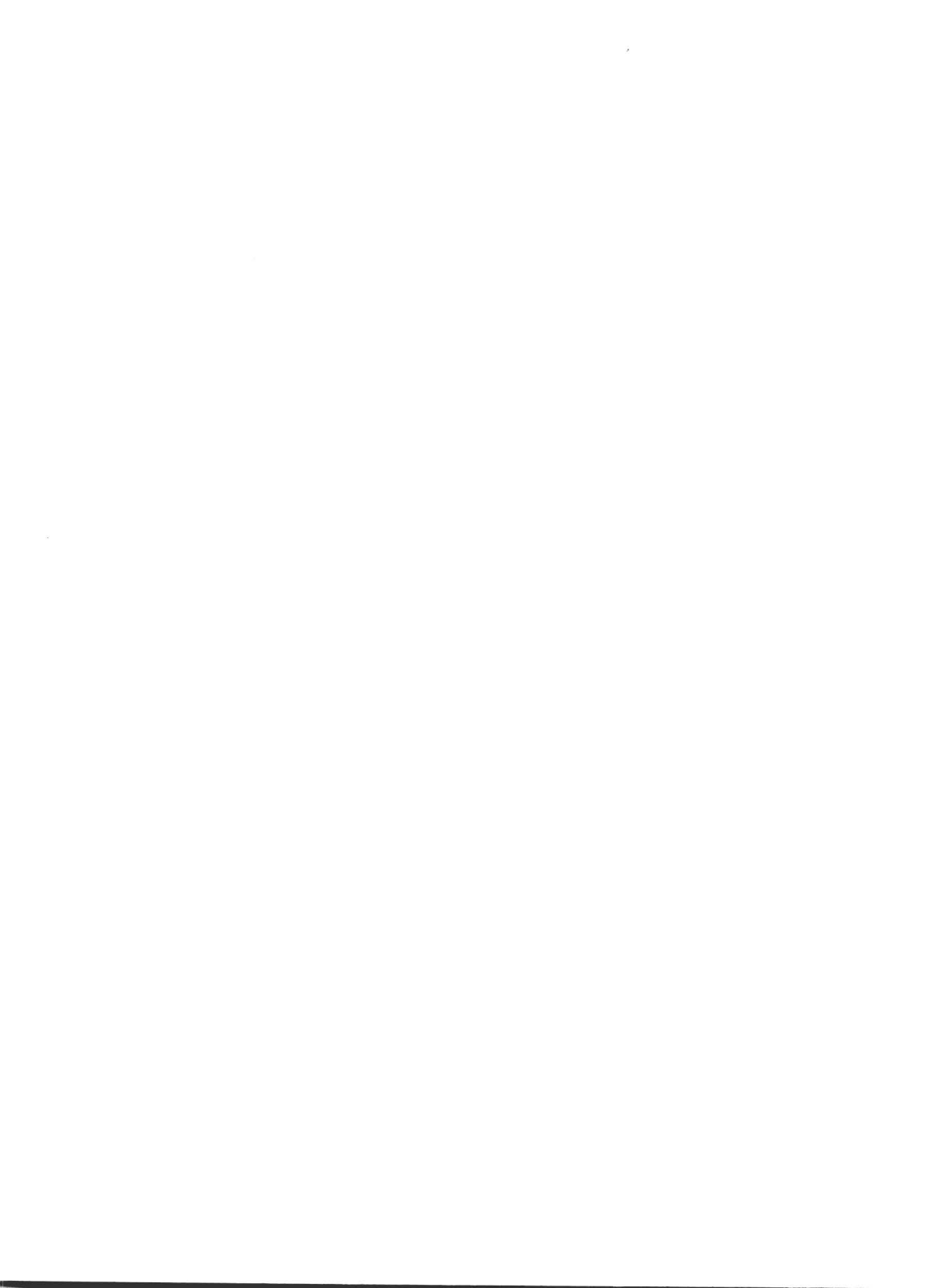
1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup spasial penelitian ini meliputi daerah Kepulauan Riau, khususnya yang mengalami pemberlakuan mata uang dolar Singapura/Malaysia sebagai alat tukar yang sah. Sedangkan ruang lingkup temporalnya adalah semenjak terbentuknya Propinsi Riau tahun 1957 hingga dikeluarkannya kebijaksanaan moneter 15 Oktober 1963 yang berisi tentang pelarangan pemakaian mata uang dolar Singapura/Malaysia di daerah Kepulauan Riau oleh Pemerintah Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Sesuai dengan tema objek yang diteliti maka metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, dicari sumber-sumber tertulis yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Kedua, memahami secara cermat sumber-sumber tersebut dengan melakukan penilaian terhadapnya. Dan ketiga melakukan interpretasi. Untuk itu, sistematika penulisan laporan ini kami bagi kedalam 6 bab.

Bab I yang merupakan pendahuluan berisi serangkaian pemikiran mengenai proses penelitian yang terurai dalam latar belakang masalah, tujuan, ruang lingkup dan metode penelitian. Bab II berisi mengenai gambaran umum daerah penelitian. Bab III berisi mengenai kondisi daerah Riau pada masa demokrasi liberal hingga terbentuknya propinsi. Bab IV berisi mengenai keadaan sosial ekonomi masyarakat Tanjungpinang pada masa dollar. Bab V berisi akibat pelarangan pemakaian mata uang asing (Singapura/Malaysia) terhadap masyarakat Kepulauan Riau dan bab VI adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



Catatan Bab I

- 1) Propinsi Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kotamadya dan 2 kota administrasi. Ke-5 kabupaten itu ialah: Kampar, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Bengkalis dan Kepulauan Riau sendiri. Kemudian, kotamadyanya adalah Pekanbaru dan Batam dan kota administrasinya adalah Tanjungpinang dan Dumai. Konon, Dumai dan Natuna akan menjadi kotamadya.
- 2) Peninggalan-peninggalannya tidak hanya terdapat di daerah Daik-Lingga, tetapi juga di Pulau Penyengat. Peninggalan-peninggalan yang terdapat di Daik-Lingga antara lain: Mesjid Sultan Lingga, makam sultan Mahmud Riayat Syah, Sultan Abdul Rahman Syah, Sultan Muhammad Syah, Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Istana Damnah dan Balairung Seri, Pondasi Gedung 44 dan beberapa meriam. Kemudian, peninggalan yang terdapat di Pulau Penyengat antara lain: Mesjid Raya, Komplek Makam Engku Puteri dan Makam Raja Haji Fisabillillah yang pada saat tulisan ini dibuat telah dianugerahi oleh pemerintah sebagai Pahlawan Nasional.
- 3) Dari ribuan pulau itu yang berpenghuni tidak kurang dari 345 pulau. Selebihnya, walaupun belum atau tidak berpenghuni sebagaimana dimanfaatkan sebagai areal pertanian dalam arti luas.
- 4) Kebijakan 15 Oktober 1963 adalah kebijakan yang berkenaan dengan pelarangan penggunaan mata uang dolar

Singapura/Malaysia oleh pemerintah Indonesia. Langkah ini sebagai salah satu jawaban adanya ketegangan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia yang dikenal dengan sebutan "konfrontasi". Kemudian, pemerintah Indonesia menggantikan mata uang dollar Singapura/Malaysia dengan rupiah Kepulauan Riau (KR.Rp). Hal ini dimaksudkan untuk mendedolarisasikan daerah Kepulauan Riau, sehingga pada gilirannya masyarakat akan percaya dalam menggunakan mata uang Indonesia, yaitu rupiah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

2.1 Sekilas Tentang Riau

2.1.1 Letak dan Keadaan Alam

Riau⁵⁾ dimana terletak daerah tingkat II Kepulauan Riau. Secara astronomis terletak melintang di antara 1°5' lintang selatan dan 2°25' lintang utara dan membujur diantara 100° dan 105°45' bujur timur. Propinsi yang luasnya kira-kira 395.102 km² dengan rincian: daratan dan pulau-pulau kira-kira 94.562 km², laut 176.530 km², dan sungai, danau serta rawa-rawa kira-kira 124.010 km². Sebelah utara berbatasan dengan propinsi Sumatera Utara dan bagian selatan Selat Malaka, selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi, timur berbatasan dengan bagian selatan Selat Malaka (termasuk Selat Singapura) dan Laut Cina Selatan dan barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat dan bagian barat daya Propinsi Sumatera Utara.

Secara fisik propinsi ini dapat dilihat sebagai dua wilayah lingkungan alam yang berbeda yakni daratan (wilayah yang merupakan bagian dari Pulau Sumatera) dan kepulauan. Pengkategorian ini pada gilirannya memunculkan adanya istilah "Riau Daratan" dan "Riau Kepulauan". Untuk yang disebutkan terakhir ini Suparlan (1995) menyebutnya sebagai "Kepulauan Riau".

Pada umumnya wilayah daratan Riau terdiri atas dataran rendah yang diselimuti oleh hutan primer dan sekunder yang disana-sini terdapat aliran-aliran sungai besar dan kecil, genangan rawa-rawa, danau-danau kecil dan tanah-tanah becek yang terendam air. Dataran tinggi yang berupa perbukitan (merupakan kepanjangan dari Bukit Barisan) terletak di dekat perbatasan dengan propinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sedangkan, wilayah kepulauan terdiri atas gugusan pulau yang menjorok sampai dengan perbatasan perairan Malaysia, Laut Cina Selatan dan Kalimantan Barat. Wilayah ini menurut Suparlan (1995) dalam kepustakaan lama dikenal dengan nama *Riau Archipelago*.

2.1.2 Kependudukan

Berdasarkan registrasi penduduk akhir 1994, Riau berpenduduk 3.568 832 jiwa. Padahal, pada awal pembentukan propinsi (1957), menurut Mubyarto (1993) kurang lebih hanya satu juta jiwa. Ini artinya, Riau telah menjadi semacam "magnet" bagi penduduk dari luar daerah. Konsekwensi logisnya adalah bahwa penduduk Riau terdiri atas berbagai golongan sosial, sukubangsa dan kebudayaan. Dengan perkataan lain, masyarakat majemuk. Kemajemukan itu antara lain ditandai oleh adanya berbagai macam suku bangsa atau masyarakat, seperti: Melayu, Cina, Arab, Jawa, Minang, Batak, Bugis, masyarakat terasing⁶⁾ dan sebagainya. Diantara berbagai macam suku bangsa itu, orang Melayu merupakan terbesar dan dominan dalam segi kebudayaan.

2.1.3 Pendidikan

Secara umum keadaan pendidikan di Propinsi Riau dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tahun anggaran 1994/1995 jumlah Taman Kanak-kanak tercatat 372 unit dengan jumlah murid 17 259 orang dan guru 1.176 orang. Sekolah Dasar (SD) ada 3 256 unit dengan jumlah murid 620 949 orang dan guru 25.794 orang. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) ada 437 unit dengan jumlah murid 125.303 orang, sedangkan

(Sekolah Menengah Umum) SMU ada 178 unit dengan siswa 69.758 orang. Sementara itu, akademi/ perguruan tinggi ada 14 unit dengan jumlah mahasiswa 23.106 orang. Dari jumlah mahasiswa itu yang pada tahun anggaran 1994/1995 menyelesaikan kuliahnya tercatat 2.047 orang. Ini artinya, jika tahun anggaran berikutnya lulusan SMU meneruskan kuliah semua, maka akademi/ perguruan tinggi yang terdapat di Riau tidak dapat menampungnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika lulusan SMU banyak yang keluar dari Riau, seperti ke Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jawa. Sayangnya, data dan informasi ini belum kami ketahui secara pasti. Akan tetapi yang jelas, karena satu dan lain hal, jumlah mereka yang meneruskan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak meneruskan. Dan ini artinya bahwa tingkat pendidikan masyarakat Riau dapat dikatakan "sedang" (pada umumnya berkisar antara SD, SMTP dan SMU).

2.1.4 Perekonomian

Berdasarkan hasil survey sosial ekonomi 1994 penduduk Riau yang berusia 10 tahun keatas tercatat 2.790 779 jiwa. Dari jumlah itu sebagian besar 51,13% sudah bekerja di berbagai sektor⁷⁾ (pertanian, jasa, perdagangan, dan lainnya). Di antara sektor-sektor itu yang digeluti oleh sebagian besar 57,69% dari mereka yang sudah bekerja itu adalah pertanian. Selebihnya adalah mereka yang menggeluti sektor jasa 12,67%, sektor perdagangan 13,57% dan lainnya 16,06%. Ini artinya, bahwa secara mikro kehidupan masyarakat Riau sebagian besar bergantung pada hasil pertanian dalam arti luas (termasuk nelayan), walaupun produk bruto (diuangkan) pada sektor ini tidak merupakan yang tertinggi, karena catatan statistik Propinsi Riau menunjukkan bahwa yang tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika Mubyarto (1993) mengatakan bahwa salah satu modal utama daya tarik Propinsi Riau bagi para pendatang adalah kekayaan sumber daya alamnya, yaitu minyak bumi, timah (sudah habis ditambang), hutan, perikanan dan perkebunan.

Propinsi Riau dalam segi pertumbuhan penduduknya memang sangat pesat, sebagai contoh pada awal pembentukan propinsi, Riau hanya berpenduduk kurang dari 1 juta, kini lebih dari 3 juta. Fenomena ini jika kita amati secara jeli, maka kita dapat menyimpulkan bahwa propinsi ini adalah propinsi yang "mapan" (kaya). Bahkan, Mubyarto (1993) menyebutkan bahwa ketenaran Riau sebagai propinsi terkaya di Indonesia adalah karena propinsi ini penghasil minyak terbesar di Indonesia. Untuk itu tidak mengherankan jika dewasa ini Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Propinsi Riau mencapai 4 juta rupiah. Ini artinya, sama dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara tetangga Malaysia. Akan tetapi, bila minyak bumi dikeluarkan dari PDRB, nilainya anjlok menjadi Rp 800.000,00. Dalam hal ini kami sependapat dengan Mubyarto (1993) yang mengatakan bahwa angka tersebut adalah angka rata-rata yang artinya ada yang di atas dan banyak yang dibawah angka rata-rata tersebut. Dengan demikian PDRB atau kemakmuran rata-rata hanyalah sekedar indikator kemajuan, tetapi sama sekali tidak bisa dianggap sebagai sasaran atau tujuan pembangunan regional. Kalau demikian halnya, sangatlah perlu penelitian yang mendalam tentang ekonomi keluarga masyarakat Riau.

2.1.5 Sejarah

Sesudah jaman yang terakhir, datanglah orang-orang yang berciri ras *weddoid* ke nusantara, termasuk ke daerah Riau. Sampai sekarang sisa-sisa mereka masih ada yakni: orang Sakai, Hutan dan Kubu yang kemudian disebut sebagai "orang asli".

Dalam kurun waktu 2.500--1.500 Sebelum Masehi (SM) datanglah orang-orang yang kemudian disebut sebagai "Proto Melayu". Melalui Semenanjung Malayu, mereka menyebar ke Pulau Sumatera. Sisa-sisa mereka yang kemudian dikenal sebagai Orang Talang Mamak dan Orang Laut masih dapat ditemukan di daerah Riau. Gelombang migrasi berikutnya adalah yang terjadi sesudah tahun 1500 SM, mereka disebut sebagai "Deutro Melayu" (Melalatoa, 1986:190).

Ini artinya, bahwa sebelum orang Melayu datang ke nusantara (baca daerah Riau) disana telah ada penduduknya, sebagaimana dikemukakan oleh Suparlan (1995) berdasarkan catatan ahli kepurbaakalaan (Van Heakeren dan Soekmono). Bahkan, menurut kedua pakar tersebut bukan hanya ras *weddoid* saja, tetapi juga *Austroloid*. Hal itu tercermin dari orang Sakai yang bercirikan *weddoid* dan *Austroloid*.

Suparlan menduga bahwa penduduk yang tergolong ras *weddoid* dan *Austroloid* itu masuk ke pedalaman (hutan) karena terdesak oleh orang-orang *Proto Melayu*. Sementara itu, orang-orang *Deutro Melayu* (yang datang kemudian) juga mendesak orang-orang ke pedalaman, sehingga terdapat percampuran antara *weddoid*, *Austroloid* dan *Proto Melayu*. Selain itu, ada orang-orang *Proto Melayu* yang melarikan diri ke pedalaman, dan ada juga yang hidup berdampingan, becampur baur dengan orang-orang dari *Deutro Melayu* (Suparlan, 1993: 39 – 40).

Selanjutnya, mengenai kronologis sejarah Riau adalah sebagaimana kami sebutkan pada bagian pendahuluan yang oleh Suparlan berdasarkan catatan Soewardi ada 7 masa, yakni: 1) masa pengaruh kerajaan Sriwijaya; 2) masa kemerdekaan kerajaan-kerajaan Melayu; 3) masa prosesnya kerajaan-kerajaan Melayu; 4) masa kepunahan kerajaan-kerajaan Melayu; 5) masa munculnya kerajaan-kerajaan besar; 6) masa kerajaan Riau Lingga dan 7) masa menjelang kemerdekaan. Sebagai catatan masa-masa tersebut telah terinci pada bagian pendahuluan. Oleh karena itu tidak perlu kami jelaskan dibagian ini.

2.2 Sekilas Tentang Daerah Tingkat II Kepulauan Riau

2.2.1 Letak dan Keadaan Alam

Kepulauan Riau sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, adalah satu daerah tingkat II yang tergabung dalam satu wilayah. Secara astronomis daerah tingkat II ini terletak melintang antara 4°15' LU--0°48' LS dan membujur antara 103°10' BT--109° BT. Luas wilayahnya mencapai 250.162

km². Bahkan diperkirakan lebih dari itu, yaitu mencapai 260.000 km². Daerah yang sebagian besar berupa perairan 96%⁸⁾ dengan ribuan pulau ini 1.062 pulau sebelah utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan dan Jambi, timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Propinsi Kalimantan Barat dan barat berbatasan dengan Semenanjung Malaysia, Singapura, Kotamadya Batam, Bengkalis, Indragiri Hilir dan Kampar.

Dari ribuan pulau yang terhampar di wilayahnya itu, tidak kurang dari 345 pulau diantaranya sudah berpenghuni. Sedangkan, selebihnya walaupun belum atau tidak berpenghuni sebagian telah dimanfaatkan sebagai areal pertanian dalam arti luas. Pulau-pulau yang tersebar itu merupakan sisa-sisa erosi daerah dataran pada masa pra tersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia sampai Pulau Bangka dan Belitung. Penelitian dari berbagai pihak menyebutkan bahwa Kepulauan Riau yang daerahnya berbukit-bukit dan lembah yang landai, keadaan tanahnya terdiri atas organosol dan clay humik, podsolik, litosol dan latosol yang mengandung granit. Batu-batuannya kebanyakan merupakan batuan metamor dan batuan beku yang berasal dari pra tersier, sedangkan penyebaran batuan sedimen sangat terbatas.

Daerah yang beriklim tropis dengan temperatur terendah 22° Celcius dan tertinggi 32° celcius dan kelembaban udara 85% ini curah hujannya rata-rata pertahun mencapai 2.000 mililiter. Bulan Desember merupakan bulan dengan curah hujan tertinggi dan bulan Agustus merupakan bulan dengan curah hujan terendah. Adapun sungai-sungai yang mengalirinya hanya merupakan sungai-sungai kecil, sehingga kurang berarti bagi lalu lintas pelayaran, sebagai sungai Siak yang ada di Riau Daratan. Sungai-sungai itu pada umumnya merupakan pembuangan air rawa-rawa. Hanya satu dimanfaatkan sebagai sumber air minum, yaitu Sungai Pulau yang berada di Pulau Bintan.

2.2.2 Kependudukan

Berdasarkan registrasi penduduk yang dilakukan oleh kantor statistik kabupaten Kepulauan Riau akhir tahun 1996,

penduduk Kepulauan Riau tercatat 501.691 jiwa⁹, dengan kepadatan 50 jiwa per-km². Dari jumlah itu tercatat jumlah laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan (laki-laki 51,4% perempuan 48,6%). Mengapa demikian? Mungkin ini memerlukan penelitian yang khusus. Penyebarannya tidak merata, tetapi terkonsentrasi pada 4 pulau utama (Bintan, Karimun, Kundur dan Singkep). Dengan perkataan lain keempat pulau itulah sebagian besar (68,6%) penduduk Kepulauan Riau bermukim. Inilah yang kemudian menyebabkan kegiatan sosial dan ekonomi terkonsentrasi di empat pulau tersebut. Kepadatan tertinggi tercatat di Kecamatan Tanjungpinang Barat (687 jiwa per-km²) sedangkan terendah tercatat di Kecamatan Galang (15 jiwa per km²).

2.2.3 Pendidikan

Lembaga pendidikan yang terdapat di Kepulauan Riau, tidak hanya terbatas pada Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Umum (SMU), tetapi lebih dari itu. Bahkan, dari Taman Kanak-kanan (TK) sampai ke Perguruan Tinggi (PT). Pada saat penelitian ini dilakukan jumlah TK-nya tercatat 60 unit dengan jumlah murid 3.723 orang dan guru 225 orang. Kemudian, jumlah SD tercatat 508 unit dengan jumlah murid 77.746 orang dan jumlah guru 3.879 orang, jumlah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) 62 unit dengan jumlah murid 21.441 orang dan guru 1.374 orang. Sekolah Menengah Tingkat Akhir (SMTA) tercatat 30 unit dengan jumlah guru 1720 orang. Sementara itu, jumlah perguruan tinggi hanya 2 yakni Sekolah Tinggi Tarbiah (STIT) dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning.

Gambaran di atas belum termasuk sekolah-sekolah yang dikelola oleh departemen selain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DEPDIKBUD). Namun demikian, lepas dari masalah itu yang jelas bahwa salah satu perguruan tinggi yang cukup dikenal di kota Tanjungpinang (STIA Lancang Kuning) dari tahun ajaran 1991/1992--1995/1996 tercatat telah meluluskan mahasiswanya sejumlah 1.470 orang. Ini artinya, jika dikaitkan dengan jumlah penduduknya yang 501.691 jiwa, dapat dikatakan bahwa pada umumnya tingkat pendidikan masyarakat

Kepulauan Riau adalah pada tingkat menengah. Ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor antara lain sosial dan ekonomi.

2.2.4 Perekonomian

Sebagaimana meta pencaharian yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Riau, masyarakat Kepulauan Riau yang merupakan bagian dari masyarakat Riau, sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian dalam arti luas. Namun demikian, bukan berarti bahwa produk sektor ini merupakan yang terbesar sebagaimana yang tercermin pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha 1994--1996
(Jutaan Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	1994	1995 ^r	1996 [*]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	pertanian	123.787,41	136.554,47	150.524,83
2.	Pertambangan dan penggalian	102.127,45	137.774,97	158.418,72
3.	industri	148.362,43	172.381,59	218.258,97
4.	Listrik, gas, dan air minum	9.907,08	11.635,93	13.557,50
5.	bangunan	86.128,77	101.284,85	118.554,62
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	250.568,73	289.128,32	326.017,11
7.	Pengangkutan dan komunikasi	68.386,07	79.353,10	91.120,70
8.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	86.406,96	97.797,43	107.084,24
9.	Jasa-jasa	88.322,56	98.448,09	109.021,22
	PDRB	963.997,46	1.124.358,74	1.292.557,91

Sumber : Kepulauan Riau dalam angka, 1996

Keterangan: r: revisi, *: sangat sementara

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa PDRB di sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati urutan pertama. Urutan kedua ditempati oleh industri dan urutan ketiga sektor pertanian. Ini artinya, penganangan Batam Bintan dan sekitarnya menjadi kawasan industri dan pariwisata sudah mulai menampakkan keberhasilannya.

2.2.5 Agama

Ada lima agama yang dianut oleh masyarakat Kepulauan Riau yakni, Islam, Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Diantara ke-5 agama itu yang paling banyak penganutnya adalah Islam (401.646 penganut). Budha menempati urutan kedua (61.922 penganut), Protestan menempati urutan ketiga (12.172 penganut), Katholik menempati urutan keempat (11.070 penganut) dan Hindu menempati urutan kelima (348 penganut). Selain penganut kelima agama tersebut, masyarakat Kepulauan Riau ada yang menganut kepercayaan, mereka jumlahnya cukup besar (2.965 penganut). Untuk melaksanakan ibadah, mereka didukung oleh 593 masjid, 460 musholla, 66 gereja dan 79 vihara.

2.2.6 Sejarah

Tersebutlah orang yang bernama Nila Utama yang bergelar Sri Tri Buana datang ke Pulau Bintan. Ia berasal dari Bukit Siguntang Mahameru Palembang (Sriwijaya). Ketika sampai di Pulau Bintan Belian diterima dengan oleh penguasa setempat yang bernama Wan Sri Benai. Oleh penguasa setempat itu Beliau diangkat sebagai raja. Dan, di bawah pemerintahannya Kerajaan Bintan semakin berkembang. Malahan, Beliau melebarkan kekuasaannya hingga ke Tumasik (sekarang Singapura) yang kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahannya hingga empat generasi.

Iskandar Syah (Parameswara) adalah generasi terakhir yang wafat pada tahun 1444. Beliau memindahkan pusat kekuasaannya ke Melaka karena adanya infasi dari Majapahit. Di tempat yang baru itu para penerusnya berhasil

mengembangkannya sebagai bandar dagang yang disinggahi (tempat bertemunya) antar pedagang dari Asia Barat dan Timur. Pada masa pemerintahan Mahmud Syah I bandar tersebut dirampas oleh Portugis pada tahun 1511. Oleh karena itu, Beliau pindah ke Johor dan tidak lama kemudian menuju ke Bintan. Dari sini Beliau melanjutkan perjalanannya ke Kampar dan wafat di sana (tahun 1528).

Beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Alauddin Riayah Syah (1528--1564). Poeponegoro (1984) menyebutkan bahwa sultan inilah yang kemudian dapat berhasil menegakkan kesultannya dan kekuasaannya hingga beberapa penggantinya walaupun diserang dan dibawah pengaruh Aceh (1613). Bahkan salah seorang anak Alauddin Riayah Syah III yang bernama Bujang tetap menggantikannya (bertahta) dengan gelar Abdul Jalil Riayah Syah III sebagai Sultan di Johor. Sementara itu, salah seorang anaknya yang lain mendirikan kerajaan baru di Perak. Pada tahun 1641 Abdul Jalil Riayah Syah III (Raja Bujang) bersama Aceh dan Belanda menyerang kolonialis Portugis dan berhasil menghancurkannya.

Ibrahim Syah (pengganti Abdul Jalil Riayah Syah III yang memerintah dari tahun 1678--1685) memindahkan pusat pemerintahan ke Riau. Namun, oleh putranya (Mahmud Syah II yang memerintah dari tahun 1685--1699) dipindahkan lagi ke Johor.

Ahmad (1985) menyebutkan bahwa setelah Mahmud Syah II wafat (1699), penguasa di Johor beralih kepada Bendahara Sri Maharaja Abdul Jalil. Beliau menggantikan sebagai Sultan Johor - Riau yang bergelar Abdul Jalil Riayah Syah. Pada tahun 1708 pusat pemerintahan dipindahkan ke Riau. Akan tetapi, 7 tahun kemudian dipindahkan lagi ke Johor, tepatnya di pancur.

Pada masa pemerintahannya keadaan politik kurang stabil. Konflik tidak saja dari dalam tetapi juga dari luar¹⁰. Akibatnya, sejak tahun 1717--1722 Johor dapat direbut dan dikuasai Raja Kecil. Akan tetapi, Raja Sulaiman (putera Abdul Jalil Riayah Syah) dapat merebutnya kembali. Beliaulah yang

kemudian menjadi penguasanya dan bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah (penobatannya dilakukan pada 4 Oktober 1722). Dalam menjalankan pemerintahannya, secara turun-temurun, Beliau dibantu oleh Yang Dipertuan Muda yang dijabat oleh para bangsawan Bugis.

Perebutan kekuasaan antara keturunan Mahmud Syah II dan Abdul Jalil Riwayat masih terus berlanjut meskipun Abdul Jalil telah tiada. Sementara itu, pengganti Raja Kecil pun (Alamuddin Syah) melakukan penyerangan terhadap Sultan Sulaiman. Oleh karena itu, pada tahun 1755 (bersama Belanda) Sultan Sulaiman berganti menyerang Siak dan dapat menguasainya.

Setelah Beliau wafat diganti oleh puteranya yang bernama Abdul Jalil Muazamsyah. Namun, Beliau tidak berumur panjang, sehingga puteranya yang masih muda (Teungku Ahmad) menggantikannya (1761). Sayangnya, Sultan ini juga tidak berumur panjang. Untuk itu adiknya (Teungku Mahmud) yang menggantikannya dan bergelar Mahmud Syah III. Beliau dalam menjalankan pemerintahannya didampingi oleh Yang Dipertuan Muda III (Daeng Kemboja) hingga tahun 1777. Sepeninggal Daeng Kemboja jabatan tersebut dipegang oleh Raja Haji (Yang Dipertuan Muda IV, 1777--1784) ¹¹

Tahun 1801 Sultan Mahmud Syah III memindahkan pusat pemerintahannya dari Riau (Ulu Riau) ke Lingga. Di tempat yang baru inilah Beliau membangun mesjid, pasar dan kota parit (benteng). Selanjutnya, Beliau mengawini Raja Hamidah (Engku Puteri). Dan konon, Pulau Penyengat sebagai mas kawinnya.

Pada tahun 1808 Raja Jakfar yang menjabat sebagai Yang Dipertuan Muda VI memindahkan kedudukannya dari Kota Piring (Ulu Riau) ke Penyengat dan membangun tempat itu sebagai pusat pemerintahan, pertahanan dan kebudayaan Melayu yang kemudian diteruskan oleh para penggantinya (tahun 1913 kerajaan ini dihapus oleh Pemerintah Belanda). Sedangkan, di Lingga yang juga sebagai pusat pemerintahan.

dibangun sebagaimana yang dilakukan di Penyengat. Sebagai catatan, mulai dari Sultan Mahmud Syah yang memerintah hingga tahun 1812, Sultan Abdul Rahman Syah, Sultan Muhammad Syah, Sultan Mahmud Muzaffar Syah sampai dengan Sultan yang terakhir (Abdul Rahman Muazzam Syah) memindahkan pusat pemerintahannya ke Penyengat tahun 1900.

Di sisi lain, Raja Kecil yang dibesarkan di negeri Minangkabau juga tetap tertarik membangun negeri di sekitar perairan Riau (tepatnya di Siak, Bengkalis). Bahkan, Beliau merebut kembali kekuasaan orang tuanya di Johor yang telah beralih ke tangan para keturunan Abdul Jalil Rakyat Syah, yang berlangsung berlarut-larut hingga para generasi penggantinya. Akhirnya, para penerus Raja Kecil tetap membangun Kesultanan Siak di tepi aliran Sungai Siak secara berpindah-pindah, yakni: Buantan, Mempura, Senapelan, dan Kota Tinggi atau Siak Indrapura, dari tahun 1723 --1946 (Sultan Ke-12, yaitu Assyaidis Syarif Kasim II). Sedangkan, keturunan Abdul Jalil Rakyat Syah tetap berkedudukan di Riau (Ulu Sungai Riau, Kepulauan Riau) dengan nama Kesultanan Johor-Riau-Lingga dan Pahang. Kesultanan tersebut akhirnya menjadi kesultanan Riau-Lingga, sesuai dengan nama daerah dan wilayah kekuasaannya.

2.3 Masyarakat dan Kebudayaan

Masyarakat dan kebudayaan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Suatu masyarakat, betapapun sederhananya, akan mengembangkan kebudayaan sebagai acuan dalam menanggapi lingkungannya dalam arti luas. Dengan demikian, tanpa masyarakat kebudayaan tidak pernah ada dan sebaliknya. Oleh karena itu kebudayaan menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, maka definisi yang berkenaan dengan kebudayaan beragam. Hal itu bergantung cara pandang (pendekatan) terhadap kebudayaan itu sendiri.

Kebudayaan yang kami maksudkan pada kesempatan ini mengacu pada Suparlan (1995) yang mendefinisikan kebudayaan sebagai berikut:

“kebudayaan didefinisikan sebagai pengetahuan dan keyakinan yang dipunyai oleh masyarakat yang digunakan sebagai pedoman atau *blueprint* bagi kehidupan oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Sebagai pedoman untuk kehidupan, maka kebudayaan digunakan sebagai acuan untuk mendorong serta menghasilkan terwujudnya tindakan-tindakan yang bermakna dalam menghadapi lingkungan tersebut, untuk dapat memanfaatkannya. Setiap kebudayaan terdiri atas sistem-sistem kategorisasi yaitu untuk mengkategorisasikan dirinya dan lingkungan-lingkungan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat tersebut, yang sistem-sistem pengkategorisasian tersebut menghasilkan konsep-konsep yang ada dalam kebudayaan. Konsep-konsep tersebut bukan hanya pengetahuan tetapi juga keyakinan atau berisi keduanya. Setiap kebudayaan bukan hanya berisikan konsep-konsep tetapi juga teori dan metode-metode untuk mengkategorisasikan dan untuk merangkai konsep-konsep yang terseleksi. Konsep-konsep terseleksi yang dirangkai akan menjadi sebuah konsep baru dan atau teori serta metode baru yang relevan kegunaannya dengan sesuatu permasalahan yang ada dalam lingkungan yang dihadapi”

Selanjutnya, Suparlan mengatakan bahwa operasionalisasi dari kebudayaan di dalam kehidupan masyarakat adalah melalui pranata-pranata yang ada dalam masyarakat tersebut. Pranata yang merupakan sebuah sistem antarmubungan norma-norma dan peranan itu terwujud karena digunakan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dianggap penting oleh masyarakat tersebut. (Suparlan, 1995: 15)

Bertolak dari definisi tersebut, kami melihat kebudayaan Melayu sebagai pengetahuan dan keyakinan yang menjadi acuan bagi mereka dalam berinteraksi dengan lingkungannya dalam arti luas. Dengan kerangka seperti itu kami melihat bahwa struktur masyarakat dan kebudayaan Melayu adalah longgar dan terbuka. Kelonggaran dan keterbukaan masyarakat dan kebudayaan Melayu itu disebabkan karena dalam tradisi terwujudnya kebudayaan Melayu terbiasa dengan kontak-kontak dengan dunia luar, yang kemudian menimbulkan proses pembauran dan akulturasi sebagaimana ditunjukkan dalam sejarah mereka.

Keterbukaaan struktur kebudayaan Melayu memungkinkan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan kebudayaan dan penyerapan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda-beda, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama (Islam), adat-istiadat, dan sopan santun Melayu.

Di Indonesia pemusatan orang Melayu yang terbesar adalah di wilayah Propinsi Riau¹². Sedangkan, di kawasan Asia Tenggara mereka terpusat di Semenanjung Melaya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka dikenal dalam kaitannya dengan pusat-pusat kerajaan setempat di masa lampau atau dengan nama lokalitas yang secara tradisional dikenal dalam kaitannya dengan pusat kerajaan tersebut. Dengan demikian, kita sekarang mengenal orang Melayu: Siak, Indragiri Hulu, Dae, Penyengat, dan sebagainya.

Salah satu ciri yang membedakan orang Melayu dengan Non-Melayu terutama di masa lampau adalah pola kehidupannya yang berorientasi pada kelautan. Pola ini pada gilirannya membuat kebanyakan komuniti-komuniti mereka tumbuh di tepi-tepi pantai atau sungai-sungai besar. Akibatnya, komuniti-komuniti itu menjadi pusat perdagangan dan pelayaran serta satuan pengamanan jalur-jalur pelayaran internasional di kawasan Asia Tenggara. Ini artinya komuniti-komuniti mereka merupakan daerah terdepan dalam kaitannya dengan kontak-kontak kebudayaan asing. Sehubungan dengan itu, sangatlah beralasan jika Parsudi Suparlan dan Boedisantoso mengatakan bahwa orang Melayu sebenarnya adalah yang paling awal mengenal agama Islam. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ajaran-ajaran Islam meresap dalam tradisi-tradisi yang berlaku dan menyelimuti berbagai upacara dan tindakan-tindakan simbolik yang pada dasarnya bukan Islam. Kenyataan inilah yang pada gilirannya membuat orang Melayu selain memiliki ciri orientasi pada kelautan, juga dalam kehidupan berpedoman pada agama Islam. Ciri inilah yang menimbulkan adanya pandangan bahwa orang Melayu identik dengan Islam. Artinya, kalau kita bicara tentang Melayu, maka

kita tidak bisa lepas dari Islam dan sebaliknya. Lutfi (1986) mendeskripsikan bahwa Melayu identik dengan Islam hanya terjadi di Malaysia dan Singapura. Di sinipun pada mulanya demikian, karena orang tersebut masuk Islam, maka yang bersangkutan disebut atau menyebut sebagai “masuk Islam”, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Suparlan (1995) pada orang Sakai. Pengamatan kami pada orang-orang Cina dan Laut pada mulanya juga demikian. Orang Cina yang telah memeluk Islam tidak menyebut dirinya sebagai orang Cina lagi, tetapi sebagai orang Melayu, demikian juga orang Laut. Sebaliknya, orang Melayu yang tidak memeluk agama Islam disebut sebagai “keluar Melayu”. Sebagai catatan, khusus untuk orang Laut yang telah dimukimkan di Pulau Lipan oleh Depsos Kabupaten Kepulauan Riau, mereka walaupun sebagian telah memeluk agama Kristen dan sebagian lagi Islam, tetapi tetap mengakui sebagai “orang Sampan” atau “orang Laut”. Ini artinya, bahwa Melayu identik dengan Islam dan sebaliknya perlu ditinjau lagi.



Catatan Bab II

- 5) Hasan Yunus, salah seorang peneliti naskah kuno yang masih keturunan raja-raja kerajaan Riau Lingga, mencatat paling kurang ada 3 kemungkinan nama Riau, pertama, toponimi Riau berasal dari penamaan orang Portugis rio yang berarti “sungai”. Kedua, mungkin berasal dari tokoh Sinbad Al Bahar dalam kitab Alfu Laila Wa Laila yang menyebut riahi untuk menyebut suatu tempat di Pulau Bintan, seperti yang pernah dikemukakan oleh almarhum Oemar Amin Hoesin dalam salah satu pidatonya mengenai terbentuknya Propinsi Riau. Ketiga, yang agaknya lebih besar kemungkinannya, berasal dari penuturan rakyat Riau sendiri berasal dari kata rioh atau riu yang berarti “hiruk-pikuk”, “ramai” atau “bising. Ini konon berasal dari suatu peristiwa ketika didirikannya negeri baru di Sungai Carang untuk dijadikan sebagai pusat kerajaan. Hulu sungai inilah yang kemudian bernama “Ulu Riau”. Teks yang berkenaan dengan itu adalah:

“tatkala perahu-perahu dagang yang semula pergi ke Makam Tauhid (ibukota Kerajaan Johor) diperintahkan membawa barang dagangannya ke sungai Carang di Pulau Bintan (suatu tempat sedang didirikan negeri baru) di muara sungai itu mereka kehilangan arah. Bila ditanyakan kepada awak-awak perahu yang hilir, “dimana tempat orang-orang mendirikan negeri” mendapat jawaban “disana tempat yang rioh” sambil mengisyaratkan ke hulu sungai. Menjelang sampai tempat yang dimaksud, jika ditanya

kemana maksud mereka, selalu mereka jawab “meu ke rioh”. Jadi, semula nama riau digunakan untuk nama sebuah negeri baru yang kemudian menjadi pusat kerajaan di Pulau Bintan. Nama ini agaknya paling kurang mulai diperkenalkan sejak Raja Kecil memindahkan pusat kerajaan dari Johor ke Ulu Riau tahun 1719. Setelah itu nama ini dipakai untuk menunjukkan satu diantara 4 daerah utama kerajaan Johor, Pahang, Riau dan Lingga. Kemudian setelah perjanjian London 1824 yang membelah dua kerajaan tersebut menjadi dua bagian, maka nama riau merujuk pada kerajaan yang meliputi kira-kira kepulauan Riau sekarang ini. Ketika nama riau digabungkan dengan lingga muncullah istilah kerajaan “Riau Lingga”. Dalam zaman pemerintahan Belanda nama ini dipergunakan untuk daerah kepulauan Riau sekarang ini ditambah dengan pesisir timur Sumatera, begitu juga dipergunakan untuk nama sebuah kabupaten dalam wilayah Propinsi Sumatera Tengah. Setelah Propinsi Riau terbentuk tahun 1958, maka nama itu disamping dipergunakan untuk nama sebuah kabupaten, dipergunakan pula untuk nama sebuah propinsi seperti sekarang ini (Hamidy, 1990)

- 6) Suku bangsa terasing atau masyarakat terasing yang terdapat di daerah Riau adalah: a) orang Sakai yang tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkalis; b) orang Talang Mamak yang tinggal dalam wilayah kabupaten Indragiri Hulu; orang Laut yang tinggal dalam wilayah kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Riau; orang Akit yang tinggal dalam wilayah kabupaten Bengkalis; orang Hutan yang tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan Orang Bonai yang tinggal dalam kabupaten Kampar.
- 7) Perekonomian masyarakat Riau dapat dikategorisasikan ke dalam 9 sektor yaitu: 1) pertanian dalam arti luas yang meliputi: peternakan, kehutanan dan perikanan, 2) pertambangan dan penggalian, 3) industri pengolahan, 4)

listrik, gas dan air minum, 5) bangunan, 6) perdagangan, restoran dan hotel, 7) pengangkutan dan komunikasi, 8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan 9) jasa-jasa.

8. Datarannya yang hanya 4% terdiri atas perbukitan dan pantai-pantai yang landai. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Kantor Statistik Kabupaten Kepulauan Riau (1996) ada 133 gunung yang bercokol di lima kepulauan (Lingga, Singkep, Bintan, Karimun, Anambas, dan Bunguran) yang tergabung dalam wilayahnya. Gunung-gunung itu adalah sebagai berikut: Daik dengan ketinggian 1.272 M, Sepincan (800 M), tanda (343 M), Lanjut (519 M), Muncung (415 M), Bintan (380 M), Jantan (478 M), Datuk (510 M), Tukong (477 M), Selasih (387 M), Lintang (610 M), Punjang (443 M) dan ranai (959 M).
9. Jumlah itu tersebar pada 18 kecamatan yang tergabung dalam wilayahnya. Jumlah penduduk pada setiap kecamatan adalah sebagai berikut: 1) Kecamatan Singkep 35.534 jiwa dengan kepadatan 42 jiwa per-km², 2) Lingga 23.513 jiwa dengan kepadatan 26 jiwa per-km², 3) Senayang 17.390 jiwa dengan kepadatan 45 jiwa per-km², 4) Galang 16.518 jiwa dengan kepadatan 15 per-km², 5) Moro 19.081 jiwa dengan kepadatan 29 jiwa per-km², 6) Kundur 54.465 jiwa dengan kepadatan 91 jiwa per-km², 7) Karimun 78.885 jiwa dengan kepadatan 287 jiwa per-km², 8) Bintan Utara 28.531 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa per-km² 9) Bintan Timur 40.363 jiwa dengan kepadatan 42 jiwa per-km² 10) Jemaja 6.850 jiwa dengan kepadatan 26 jiwa per-km² 11) Tambelan 4.218 jiwa dengan kepadatan 25 jiwa per-km² 12) Siantan 22.260 jiwa dengan kepadatan 32 jiwa per-km² 13) Midai 4.785 jiwa dengan kepadatan 96 jiwa per-km² 14) Bunguran Barat 18.453 jiwa dengan kepadatan 18 jiwa per-km² 15) Bunguran Timur 15.967 jiwa dengan kepadatan 16 jiwa per-km² 16) Serasan 8.745 jiwa dengan kepadatan 37 jiwa per-km² 17) Tanjungpinang Barat 48.440 jiwa dengan kepadatan 687 jiwa per-km² 18) Tanjungpinang Timur 57.890 jiwa dengan kepadatan 343 jiwa per-km²

10. Abdul Jalil Riayat Syah mendapat serangan dari Kerajaan Siak di bawah pimpinan Raja Kecil. Raja Kecil adalah putera dari hasil perkawinan antara Sultan Mahmud Syah II dan Encik Pong.
11. Raja Haji lahir di Hulu Sungai Riau (Kota Lama) tahun 1727 dari hasil perkawinan antara Daeng Celk (Yang Dipertuan Muda II) dan Teungku Mandak. Pada saat ayahanda wafat, Beliau tidak langsung (diangkat) menjadi Yang Dipertuan Muda III, tetapi diangkat sebagai Engku Kelana (calon Yang Dipertuan Muda) karena usianya yang masih muda (19 tahun). Adapun tugasnya adalah menjaga dan mengawal segenap kekuasaan Kerajaan Riau dari segala macam bentuk ancaman. Dan, tugas itu dilaksanakan dengan baik. Sedangkan, yang diangkat sebagai Yang Dipertuan Muda III adalah Daeng Kemboja. Dengan perahu komando "Bulan Langgi", Raja melakukan perjalanan inspeksi dan mengunjungi kerajaan-kerajaan tetangga untuk membina hubungan dan persahabatan. Jalur lintasan pelayarannya ialah dari Indragiri di sebelah barat hingga ke Mempawah dan Sanggau di sebelah timur dari Perak di utara sampai Bangka di selatan. Hasil positif yang didapat adalah terbentuknya hubungan dan gabungan kekuatan baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama jika timbul konflik dengan kekuatan asing. Dalam kedudukannya sebagai Engku Kelana, Raja Haji banyak membantu menegakkan kekuasaan kerajaan-kerajaan sahabat seperti: Indragiri, Kedah, Selangor, Jambi, Pontianak, Siak, Pahang, dan Palembang. Pada tahun 1777, ketika Daeng Kemboja (Yang Dipertuan Muda Riau III), maka beliau diangkat dan dilantik sebagai Yang Dipertuan Muda Riau IV. Berbekal pengalaman selama menduduki jabatan Engku Kelana, Kerajaan Riau mengalami kemajuan yang amat pesat, tidak saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga pertahanan, sosial, budaya dan agama. Pusat pemerintahannya berada di Pulau Biram Dewa yang dikenal dengan Istana Kota Piring. Kapal-kapal dari berbagai negeri pun berdatangan seperti Cina, Siam, Jawa, Malaka

bahkan Eropa. Pelajaran baca tulis huruf Arab Hijaiyah dilaksanakan di mesjid. Ulama dan mubaligh berdatangan untuk mengajarkan agama Islam secara mendalam. Kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Raja Haji dalam menjalankan pemerintahannya banyak yang tidak disenangi oleh Belanda. Dan ini membuat Belanda menganggap Raja Haji adalah musuh utamanya. Pelanggaran dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Belanda terhadap janji yang pernah dibuat menimbulkan kebencian dan antipati Raja Haji terhadap mereka. Perampasan kapal Inggris "Betsy" yang sarat dengan muatan pada saat berlabuh di wilayah perairan Riau (di Pulau Bayan) oleh satu ekspedisi Belanda tanpa sepengetahuan Raja Haji merupakan pelanggaran kedaulatan. Kapal tersebut oleh Belanda diseret ke Melaka dan isinya dijual. Ini tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan pada masa Yang Dipertuan Muda Riau III (1758). Dalam hal ini seharusnya Kerajaan Riau mendapat bagian. Oktober 1782 Raja Haji bersama pasukannya berangkat menuju Muar (dekat Malaka) dan mengirim utusan untuk menuntut pertanggungjawaban Belanda atas kapal Inggris yang mereka rampas. Belanda menolak dan Raja Haji pun marah. Untuk itu, beliau memutuskan mengembalikan naskah perjanjian dan menganggap bahwa perjanjian itu tidak sah lagi. Kemudian beliau bersama pasukannya menyerang armada dagang Belanda yang melintasi wilayah Riau dan memaksa kapal-kapal dagang yang akan ke Malak berpatah balik ke Riau. Bagi yang dirampas atau ditenggelamkan. Kembali dari Muar, raja haji mempertahankan pertahanan Riau dengan membangun beberapa benteng di tempat-tempat strategis, seperti: Teluk Keriting, Pulau Penyengat, Senggarang, dan Pulau Bayan. Selain itu, menambah perlengkapan angkatan perangnya seperti: perahu penjajah, meriam dan mesiu, sehingga Riau menjadi kekuatan yang disegani di perairan Malaka. Tindakan yang dilakukan Raja Haji di kawasan perairan Riau membuat Belanda merasa tidak aman dan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Akhirnya, Belanda menyerang Riau dengan mengirimkan

sebuah eskader yang berkekuatan 910 orang pada tanggal 18 Juni 1783. Tiga hari kemudian Belanda mengumumkan perang dan melakukan blokade dengan maksud untuk melumpuhkan perekonomian dan memperlemah perlawanan Riau. Perang terbuka mulai pecah pada bulan Juli 1783, yaitu ketika Raja Haji menyerang armada Belanda hingga porak-poranda dan mundur sampai ke Selat Lobam. Keberhasilan satu detasemen Belanda menguasai kubukubu pertahanan Riau di Pulau Penyengat dalam waktu singkat dapat direbut kembali dengan satu serangan balasan. Perang terus berkobar dan mencapai puncaknya pada tanggal 6 Januari 1784. Armada dan serdadu Belanda terus bertambah tetapi tetap tidak mampu menembus pertahanan Riau. Setelah tujuh bulan mengepung negeri Riau. Pada satu pertempuran pasukan Raja haji yang berada di benteng pertahanan Tanjungpinang berhasil menenggelamkan kapal komando terbesar Belanda "Malaka's welvaren" dan menewaskan pimpinan eskader Hakim Agung Arnoldus Lemker bersama sekitar 500 orang serdadu. Tawaran penyelesaian lewat meja perundingan selalu ditolak oleh Raja Haji karena sudah mencium niat licik Belanda. Situasi yang sudah tidak menguntungkan membuat Belanda mengambil keputusan menarik kembali seluruh kekuatannya dari Riau untuk kembali ke Malaka. Dendam dan kebencian Raja Haji terhadap Belanda dan niat untuk menghapus kekuasaan penjajah dari kawasan Riau dan Selat Malaka tidak dapat dibendung lagi. Dua minggu setelah hari naas di Riau, tanggal 13 Pebruari 1784 Raja Haji dengan berkuatan 1000 orang anggota pasukannya mendarat di Teluk Ketapang (kurang lebih 5 kilometer sebelah timur kota Malaka). Sasarannya pertamanya merebut Malaka yang pada saat itu merupakan pusat pemerintahan, pangkalan maritim Belanda dan kota perdagangan terkemuka di kawasan Selat Malaka. Sedangkan, sasaran kedua adalah, jika sasaran pertama tidak tercapai, raja Haji siap mendapat fadhillah syahid. Seperti pada waktu memimpin perang laut di Riau, gempuran Malaka dilakukan dengan inisiatif penyerangan.

Ketika Malaka mulai terdesak, secara kebetulan satuan armada kerajaan Belanda tiba di Eropa ke Batavia dalam perjalanannya ke Makassar dan Maluku. Atas permintaan Pemerintah Tinggi di Batavia armada yang dipimpin panglima Perang Jacob Van Braam dengan kekuatan 9 buah kapal perang, 2130 personil dan 362 pucuk meriam, dihadapkan ke pasukan Raja Haji di Teluk Ketapang. Tanggal 18 Juni 1784, sejumlah 734 orang bersenjata lengkap dari armada van Braam menggempur pertahanan Raja haji di teluk Ketapang, sehingga berkecamuk perang yang dahsyat yang dikenal dengan sebutan Perang Sosoh (satu lawan satu). Dalam perang ini Raja Haji bersama kurang lebih 500 pasukannya gugur. Sementara dari pasukan Belanda sekitar 70 orang serdadu dan tiga orang opsir terkorban. Tentang gugurnya Raja Haji Belanda mencatat sebagai berikut: "Raja Haji yang berdiri dekat sarang meriam untuk memberi semangat pasukannya terkena tembakan senapang di dadanya sehingga gugur". Sementara pencatat Riau menulis sebagai berikut: "maka yang dipertuan Muda Raja Haji-pun bangkit menghunus badiknya dan sebelah tangannya memegang Dalail al Khairat. Maka dipeluk oleh beberapa orang maka ditengah berpeluk-peluk itu maka Yang Dipertuan Muda Raja Hajipun kenalah peluru barus senapang. Maka iapun rebahlah mangkat syahidlah ia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun".

12. Ini bukan berarti bahwa Propinsi Riau hanya dihuni oleh orang-orang Melayu, tetapi juga suku bangsa lainnya yang berbeda budaya dan atau agamanya. Untuk yang disebutkan terakhir ini, semua agama besar ada di sana (Islam, Protestan, Katholik, Budha dan Hindu). Di antara agama besar itu yang dipeluk oleh sebagian besar masyarakat Riau adalah Islam. Sehubungan dengan itu, maka disana terdapat 3.829 mesjid, 4.598 mushalla, 263 gereja Protestan, 42 gereja Katholik, 72 vihara dan 1 pura. Tanggal 24 Juni 1784 jenazah Raja Haji yang "syahid fisabillillah" dibawa ke Malaka dan pada keesokan harinya

dimakamkan di kaki bukit bendera dengan upacara mengikut adat istiadat kebesaran dan penuh kehormatan. Tiga puluh enam tahun kemudian, oleh anaknya (Raja Jakfar atau Yang Dipertuan Muda VI) makam Raja Haji dipindahkan dari Malaka ke Pulau Penyengat. Semasa hidup Raja Haji banyak memperoleh gelar, yaitu: Pangeran Sutawijaya. Raja Api, Marhum Teluk Ketapang, marhum Syahid Fisabillilah dan yang terakhir pada tanggal 10 Nopember 1997 dianugerahi oleh pemerintah sebagai "Pahlawan Nasional" dengan bintang Mahputera Adipradana (Dikutip dari Humas Pemda Kepri).

BAB III

KONDISI DAERAH RIAU PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL HINGGA TERBENTUKNYA PROPINSI

3.1 Pengantar

Pada masa awal kemerdekaan daerah Riau belum berstatus sebagai propinsi, tetapi hanya sebagai keresidenan yang tergabung dalam Propinsi Sumatera Tengah yang beribukota di Bukittinggi. Dengan perkataan lain Riau merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Tengah. Sebagai daerah keresidenan tentunya, dalam berbagai hal, tidak begitu banyak peranannya dibandingkan daerah propinsi. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika pada saat itu Riau belum memperlihatkan peranannya pada percaturan tingkat nasional, sebab berbagai aktivitas masyarakat masih terkonsentrasi di sekitar daerah tingkat I. Riau dengan demikian, dapat dikatakan “agak terabaikan” tidak hanya peranan ataupun keterlibatan masyarakatnya dalam bidang politik, tetapi juga bidang kehidupan lainnya. Inilah yang kemudian menggugah masyarakat Riau berusaha untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah tingkat I.

3.2 Daerah Riau Pada Masa Demokrasi Liberal

Masa ini diawali dengan adanya pengakuan kedaulatan pemerintah Belanda terhadap keberadaan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dilakukan oleh Ratu Juliana

dihadapan Moh. Hatta dan De Lowink dari Belanda di Jakarta. Dengan adanya pengakuan itu, perundingan yang dilakukan antara RIS dan Belanda dibawah pengawasan *United Nations Commition for Indonesian* (UNCI) atau Komisi Tiga Negara (KTN) pun berjalan lancar. Sebagai salah satu konsekuensi dari peristiwa itu adalah daerah yang merupakan bagian dari RIS yang berstatus keresidenan dihapus, termasuk keresidenan Riau. Penghapusan itu membuat pemerintah daerah Propinsi Sumatera Tengah, berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 mengadakan konsolidasi untuk mengambil langkah-langkah terhadap penghapusan keresidenan tersebut. Langkah-langkah itu akhirnya menghasilkan keputusan, yaitu keresidenan Riau dibagi dalam empat kabupaten yaitu:

- 1) Kampar (sebagai ganti kabupaten Pekanbaru). Kabupaten yang wilayahnya meliputi Siak Hulu, Bangkinang, Rokan Kiri dan Kanan, Kampar Kiri, dan Langgam ini beribukota di Pekanbaru. Dan orang yang ditunjuk sebagai kepala daerah (bupati) adalah Dt. Wan Abdulracman.
- 2) Bengkalis yang beribukota di Bengkalis. Kabupaten ini meliputi kewedanan: Bengkalis, Siak Pelalawan, Selat Panjang dan Bagan Siapi-api. Bupati nya adalah H. Muhammad,
- 3) Indragiri yang beribukota di Rengat. Kabupaten ini wilayahnya meliputi: Sengingi, Kuantan Hulu dan Hilir, Pasirpenyu, Rengat, Siberida, Tembilahan, Enok, Reteh, Mandah, Kateman, dan Gaung Anak Serka. Bupati nya adalah Umar Usman,
- 4) Kepulauan Riau yang beribukota di Tanjungpinang. Kabupaten ini meliputi kewedanan: Tanjungpinang, Karimun, Dabo Singkep dan Pulau Tujuh. Bupati nya adalah Pakanadalyan.

Jika kita simak secara seksama, khususnya mengenai struktur administrasi pemerintahannya, kita akan melihat adanya perbedaan konsep (wilayah dan kewedanan).

Kabupaten Kampar dan Inderagiri misalnya; kedua kabupaten tersebut terbagi dalam "wilayah". Sedangkan yang lain (Kepulauan Riau dan Bengkalis) terbagi dalam kewedanan. Perbedaan pembagian tersebut (yang satu menggunakan istilah "wilayah" dan yang lain "kewedanan") pada gilirannya menimbulkan kerancuan, karena dalam kenyataannya Kabupaten Kampar dan Inderagiri yang berstatus wilayah yang mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 1948 mengalami kelumpuhan dalam pemerintahan. Hal ini terjadi karena dengan status otonominya itu ternyata mereka belum mampu berdiri sendiri dalam mengatur rumah tangga pemerintahannya. Akibatnya, banyak terjadi kesenjangan keuangan antar daerah di wilayahnya, karena wilayah-wilayah "kering" yang tidak mempunyai sumber keuangan yang memadai akan dihadapkan pada banyak kendala dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Untuk mengkoordinasi ke empat kabupaten tersebut diangkatlah seorang residen koordinator yang berkedudukan di Tanjungpinang, yang pada waktu itu dijabat oleh Jamin Dt. Bagindo.

Tahun 1954 status wilayah-wilayah di dua kabupaten (Kampar dan Inderagiri) dihapus dan dikembalikan lagi ke dalam status kewedanan dan kecamatan yang merupakan wilayah administrasi belaka (tidak berstatus otonomi). Jabatan residen koordinator yang tidak jelas statusnya itu kemudian diganti dengan residen. Dan yang ditunjuk sebagai residennya adalah Wibisono. Wibisono kemudian digantikan oleh Sutan Kumala Pontas dan yang terakhir adalah Mr. Sis Tjakraningrat.

Meskipun telah mengalami perubahan status, ternyata hal itu masih belum memecahkan permasalahan. Banyak kendala yang masih harus dihadapi dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah Riau, karena kesenjangan keuangan antarkabupaten di Propinsi Sumatera Tengah semakin melebar. Padahal, kabupaten-kabupaten hanya dapat mengharapkan subsidi dari propinsi.

Di sisi lain, dengan pulihnya kembali wilayah RI, setiap partai politik dan organisasi masa mengadakan konsolidasi organisasi masing-masing. Susunan partai-partai disesuaikan dengan struktur pemerintah. Status partai ditingkat kabupaten dijadikan cabang, sedangkan tingkat kewedanan dan kecamatan berstatus sebagai anak cabang dan ranting. Dan kegiatan kepartaian diarahkan untuk perebutan kursi-kursi di DPRD-DPRD kabupaten Tingkat II.

Pada pemilu pertama (tahun 1955) terjadi perang kampanye antarpartai. Partai-partai tersebut adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), Perti, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdatul Ulama (NU), Murba, Parkindo, Parindra, PRN, dan Partai Katholik. Akibatnya, rakyat Riau terpecah belah. Bahkan, secara perseoranganpun ada yang maju ke pemilihan umum. Oleh karena penduduk Riau pada waktu itu kurang dari satu juta jiwa (300.000 pemilih), maka mereka terpecah ke dalam puluhan partai, sehingga setiap partai hanya mendapat suara di bawah angka yang telah ditentukan. Dalam pemilihan itu hanya Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang mendapat seorang wakil dalam parlemen setelah mendapat tambahan suara dari kelebihan daerah lain, yaitu Makrifat Marjani. Sedangkan, untuk konstituante yang mewakili adalah T. Bay. Sementara itu, Tengku Achmad Atan adalah wakil dari NU, Mochtar Husin dari Madjlis Sjuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan M. Nuh dari Partai Indonesia Raya.

Letak geografis Kepulauan Riau yang berdekatan dengan negara tetangga (Singapura dan Malaysia) pada gilirannya membuat masyarakat diketiga daerah tersebut membentuk semacam kesatuan ekonomi yang didukung dengan mata uang yang sama (dollar). Sebagaimana kita tahu bahwa sejak zaman penjajahan Belanda, Kepulauan Riau merupakan daerah bebas bea cukai demikian, juga Singapura¹³⁾, sehingga perdagangan dengan Singapura dapat dilakukan seperti di dalam negeri sendiri.

Ada dua sistem yang dilakukan oleh masyarakat di luar Kepulauan Riau jika mereka ingin mengekspor dagangannya ke Singapura. Khusus bagi masyarakat daerah Bengkalis dan Kampar. Sistem yang pertama adalah yang disebut sebagai *barter consignasi*. Sistem ini berlaku untuk masyarakat daerah Bengkalis. Sedangkan, sistem yang kedua adalah yang disebut sebagai *Letter of Credit* (LC). Sistem ini dilakukan oleh masyarakat Kampar dan Indragiri.

Ekspor barang yang berasal dari Riau Daratan ke Singapura itu ditetapkan dari daerah Siak, Bengkalis, Selat Panjang dan Bagan Siapi-api dengan ketentuan 30% dikuasai langsung oleh para eksportir. Sedangkan, pengimpor barang-barang konsumsi dalam negeri, seperti beras, barang-barang esensial lainnya, dan barang-barang bebas, masing-masing 10%. Beras dan barang esensial harus masuk ke pelabuhan tertentu, sedangkan barang bebas boleh melalui pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Devisa (70%) dikuasai oleh pemerintah untuk ditukar dengan rupiah dengan kurs yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi atau mencegah penyelundupan, tanggal 1 September 1956 daerah barter yang pada mulanya hanya daerah Bengkalis diperluas hingga meliputi Kabupaten Kampar dan Indragiri.

Dalam bidang perdagangan para pedagang Tionghoa memegang peranan yang sangat penting. Mereka membeli barang-barang hasil produksi rakyat (pribumi) dan sekaligus mensuplai bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari yang diperlukan oleh rakyat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sehubungan dengan itu, jangkauan mereka sangat luas (sampai ke pelosok-pelosok desa). Jangkauan atau jaringan yang sangat luas itu pada gilirannya membuat orang atau pedagang Tionghoa, tidak hanya berdomisili di perkotaan semata, tetapi juga di pedesaan. Malahan, sebagian dari mereka ada yang menjalin hubungan perkawinan dengan penduduk setempat, sehingga kedudukan mereka di lingkungan masyarakat semakin kuat, terutama dalam memegang kendali monopoli. Dalam hal ini mereka dapat dengan leluasa

menetapkan harga barang-barang hasil usaha rakyat dan sekaligus barang yang disuplai untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari.

3.3 Daerah Riau Masa Demokrasi Terpimpin

Pada periode ini di daerah Riau muncul peristiwa-peristiwa (pergolakan) yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai akibat rasa ketidakpuasan dari para prajurit yang merasa sama-sama turut berjuang dalam menegakkan negara Republik Indonesia. Pada bulan Nopember 1956 misalnya; bekas para prajurit/perwira dari divisi Banteng mengadakan reuni dan membentuk apa yang kemudian disebut sebagai “Dewan Banteng” di Padang¹⁴). Pembentukan dewan ini dipelopori oleh Kolonel Ahmad Husen, dibantu oleh Saidina Ali, Haji Muhammad Amin dan lainnya.

Adapun tujuan pokok pendirian Dewan Banteng itu adalah sebagai dasar “perjuangan daerah” untuk menentang pemerintahan Ali Sastraamidjaja. Akan tetapi, pada umumnya rakyat Riau bersikap apatis terhadap gerakan tersebut, karena rakyat Riau pada masa itu disibukkan dengan upaya yang berkenaan dengan keinginan terbentuknya Propinsi Riau. Oleh karena itu, masyarakat Riau pada umumnya kurang menghiraukan dan tidak tertarik dengan Dewan Banteng itu.

Dalam pembicaraan-pembicaraan diacara reuni para prajurit/perwira tersebut sudah kelihatan gejala-gejala adanya penyelewengan. Ada kesan bahwa hasrat masyarakat daerah Riau dan Jambi dalam memperjuangkan terbentuknya propinsi tersendiri (terlepas dari Sumatera Tengah) akan dibelokkan. Sebaliknya, nama Sumatera Tengah selalu dibesar-besarkan dan dicoba dihidupkan dengan berbagai usaha, antara lain dengan cara menerbitkan risalah-risalah yang intinya berisi rakyat Sumatera Tengah mendukung adanya Dewan Banteng. Apabila ada suara dari Riau dan Jambi yang tidak sejalan dengan suara di Dewan Banteng maka dianggap bukan suara rakyat. Di samping itu mereka juga mengadakan tuntutan-tuntutan yang di luar kewajaran terhadap pemerintah pusat,

sehingga pemerintah tidak bisa memenuhinya. Dengan alasan itu maka selanjutnya daerah Sumatera Tengah secara sepihak, yang dipelopori oleh Dewan Banteng, pada tanggal 20 Desember 1956 melakukan penggantian pejabat gubernur secara paksa dari Ruslan Muljohardjo kepada Ahmad Husen. Selanjutnya, pada tanggal 15 Pebruari 1958 Dewan Banteng secara sepihak memproklamasikan diri sebagai Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Bukit Tinggi.

Proklamasi PRRI itu, yang notabene adalah pemberontakan, membuat pemerintah Indonesia segera melakukan berbagai upaya penumpasan pemberontakan itu. Upaya itu antara lain berupa operasi militer melalui operasi Tegas, Sapta Marga, dan 17 Agustus. Dengan cepatnya tindakan tegas pemerintah pusat ini maka kurang lebih dalam waktu dua bulan (tanggal 3 April 1958) pemberontakan tersebut dapat ditumpas oleh pasukan pemerintah Indonesia.

Kiranya perlu diketahui bahwa pada saat puncak pembentukan PRRI, Presiden (Soekarno) mengeluarkan surat keputusannya tentang Gubernur KDH TK I Riau. SK yang bertanggal 17 Pebruari 1958 No. 258/M/1958 itu mengangkat Mr. SM. Amin sebagai Gubernur KDH TK I Propinsi Riau yang pertama. Sedangkan pelantikannya dilakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang (Kepulauan Riau) oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Depdagri Mr. Sumarman. Dengan demikian pemerintahan yang baru dilantik itu harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya.

Kondisi daerah yang demikian itu membuat gubernur tidak dapat secara maksimal menjalankan roda pemerintahannya sehari-hari. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan itu maka dibentuklah Badan Penasehat (BP) Gubernur dengan tujuan untuk membantu tugas Gubernur sehari-hari. Selain itu, dibentuk juga dinas-dinas daerah yang bersifat otonom sebagai upaya pengalihan jabatan-jabatan yang tadinya bersifat sentral.

Dengan semakin terjaminnya keamanan daerah Riau terutama dari ancaman pemberontakan PRRI, dan berdasarkan keputusan Dewan Swatantra TK I Riau No. Des 52/1/44-25, ibukota Riau dipindahkan dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Karena pemerintahan menyangkut semua departemen, maka dibentuklah suatu Badan Pelaksana (BP) yang diketahui oleh penguasa perang Riau Daratan, yaitu Letkol Kaharuddin Nasution sebagai pelaksananya.

Tidak lama (kurang lebih dua tahun) setelah pemindahan ibukota Propinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru, pada tanggal 6 Januari 1960 Mr. SM. Amin digantikan oleh Letkol. Kaharuddin Nasution ini BP Gubernur yang dibentuk pada masa Mr. SM. Amin dibubarkan dan diganti dengan Badan Pemerintah Harian (BPH). Selanjutnya, untuk penyempurnaan pemerintah daerah disusunlah DPR-GR oleh BPH yang berpedoman pada hasil Pemilihan Umum tahun 1955.

Sementara itu, usaha ke arah penyempurnaan pemerintah daerahpun terus ditingkatkan. Dalam hal ini, disamping jabatan gubernur yang telah ada, perlu pula adanya wakil gubernur untuk membantu dalam melaksanakan roda pemerintahan. Karena itu, pada tanggal 25 April 1962 diangkatlah Dt. Wan Abdulrachman sebagai wakil gubernur. Penyempurnaan selanjutnya adalah pembentukan BPH dan DPR-GR ditingkat kabupaten di seluruh daerah Tk II (kabupaten) di wilayah Propinsi Riau. Mengingat luasnya daerah Riau dilakukan juga pembentukan daerah Tk. II yang baru. Sehingga Daerah Tk. II yang tergabung di wilayah Riau menjadi lima yakni: Kotamadya Pekanbaru, kabupaten Kampar, Kabupaten Inderagiri Hulu, Kabupaten Inderagiri Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Riau.

Di sisi lain pada waktu pemerintah RI memutuskan hubungan diplomatik dengan Singapura dan Malaysia, yang selanjutnya (berdasarkan Keputusan Presiden RI tahun 1963) ditingkatkan menjadi konfrontasi Fisik, daerah yang paling menanggung konsekuensi sebagai akibat keputusan itu adalah Riau. Terutama Kabupaten Kepulauan Riau dan daerah

Kabupaten Bengkalis, karena daerah Riau secara geografis berbatasan langsung dengan kedua negara tersebut. Selain itu, orientasi ekonomi masyarakatnya sudah berlangsung sejak lama sangat bergantung pada kedua negara tersebut (Malaysia dan Singapura) walaupun secara politis dan administrasi Riau tetap berada dalam wilayah Indonesia. Dengan demikian, keputusan Presiden RI yang memproklamasikan tentang konfrontasi, pada gilirannya membuat masyarakat Riau, dalam segala aktivitasnya, harus mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan perkataan lain, apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia harus diikuti oleh masyarakat Riau.

Bersamaan dengan konfrontasi itu, dalam bidang moneter, pemerintah mengambil kebijakan tidak akan memberlakukan lagi mata uang (dollar) Singapura/Malaysia sebagai alat tukar yang sah di Kepulauan Riau. Sebagai penggantinya, khususnya untuk masyarakat Kepulauan Riau, adalah mata uang pemerintah Indonesia yang kemudian disebut sebagai uang KR.RP. Mata uang dengan pembentukan lembaga perbankan yang khusus mengatur masalah moneter di daerah Kepulauan Riau. Untuk itu didirikanlah Bank Indonesia (BI) cabang Tanjungpinang yang bertujuan untuk menarik mata uang dollar dan menggantikan dengan KR.RP dengan perbandingan 1:1 (kurs).

3.4 Pembentukan Propinsi Riau

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1948 Riau adalah bagian dari Propinsi Sumatera Tengah¹⁵⁾. Pemasukan wilayah Riau ke propinsi tersebut pada mulanya diterima oleh masyarakat dengan senang hati. Akan tetapi, perkembangan selanjutnya masyarakat Riau apriori terhadap kebijakan itu, karena membawa konsekuensi penghilangan beberapa haknya, terutama yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah mereka bina dan dukung selama berabad-abad. Misalnya, daerah Siak (satu di antara kerajaan-kerajaan Melayu di Riau) telah memiliki berbagai aspek tatanan

kehidupan yang baku, sehingga wajar apabila daerah ini selalu berusaha mempertahankannya dengan melakukan perjuangan masyarakat Riau dalam mewujudkan daerahnya sebagai propinsi tidak hanya memerlukan sikap pro-aktif semata, tetapi diplomasi dan lain sebagainya. Dengan demikian pembentukan suatu propinsi, khususnya Propinsi Riau, tidak kalah uniknya dengan latar belakang sejarah masyarakat Riau sendiri.

Pada tahun 1953 misalnya, pada waktu PNI mengadakan konferensi di Rengat. Satu diantara agendanya adalah membahas masalah Propinsi Riau. Kemudian, Rakyat Kepulauan Riau (RKR) yang pada tanggal 16 Maret 1953 (tahun yang sama dengan konferensi PNI) mengadakan kongres di Tanjungpinang juga membahas masalah Propinsi Riau. Malahan kongres yang tujuannya adalah menyatukan rakyat Riau, Ketua Panitianya (HR.M. Yunus) mengirim delegasi ke Jambi guna membahas masalah pembentukan Propinsi Riau dan Jambi. Artinya Riau dan Jambi lepas dari Sumatera Tengah dan membentuk propinsi tersendiri.

Di sisi lain, setelah panitia kongres berhasil merancang konsepsinya, ternyata daerah-daerah kabupaten lain, terutama di Keresidenan Riau, menyambutnya dengan antusias. Ini adalah suatu hal yang tidak diperkirakan oleh panitia kongres sebelumnya. Oleh karena itu untuk menyempurnakan pelaksanaan kongres, panitia terpaksa menunda jadwal pelaksanaannya. Dalam hal ini pelaksanaan yang pada mulanya direncanakan tanggal 15 dan 30 Juni 1953 menjadi tanggal 15 Agustus 1953 di Tanjungpinang. Dan, menurut panitia, inipun sebenarnya belum memadai, karena panitia sangat mengharapkan partisipasi utusan dari Batanghari dan Merangin (Jambi). Mengingat hal itu, maka kongres baru dapat terlaksana pada 17 Oktober 1954 di Pekanbaru dengan persiapan yang lebih cermat, meluas dan terencana, yang kemudian terkenal dengan sebutan Kongres Pemuda Riau.

Kongres berhasil membuat beberapa keputusan, yakni mengajukan petisi kepada pemerintah pusat untuk menjadikan daerah keresidenan Riau kedalam empat

kabupaten (Kampar, Bengkalis, Indragiri dan Kepulauan Riau) yang berada dalam koordinasi suatu daerah otonomi tingkat I (propinsi). Sehubungan dengan itu, maka kongres telah membentuk suatu panitia (wakil dari keempat daerah kabupaten) yang akan bertugas ke pemerintah pusat. Selain itu, kongres juga telah membentuk BKPR (Badan Kongres Pemuda Riau), yang mempunyai komisariat pada setiap kabupaten. Untuk merealisasikan hal itu maka pada 27 Desember 1954 delegasi BKPR berangkat ke Jakarta menghadap Menteri Dalam Negeri yang pada waktu itu dijabat oleh Mr. Soenarjo. Ternyata hal ini mendapat tanggapan yang positif dari menteri, sebagaimana yang dinyatakan Pemda TK I Riau bahwa hal itu mendapat perhatian pemerintah dan dijadikan bahan pertimbangan dalam meninjau kembali pembagian pemerintah tingkat propinsi di Indonesia (Pemda Tk I Riau, 1976: 637).

Tanggapan pemerintah pusat yang melegakan itu membuat para tokoh masyarakat Riau semakin bersemangat untuk mewujudkan impiannya. Sejak saat itu pertemuan-pertemuan pun sering (berturut-turut) dilakukan. Satu diantaranya adalah Konferensi Pemuda Pelajar Riau se-Sumatera Barat (Bukittinggi, Padang, Padangpanjang, Payakumbuh dan Batusangkar) di Bukittinggi. Konferensi yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 1954 ini diketuai oleh Hasan Basri Js dan berhasil merumuskan keputusan untuk meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri agar sesegera mungkin membentuk Propinsi Riau yang meliputi empat kabupaten.

Kongres yang lain adalah yang dilakukan oleh Pemuda Komisariat Inderagiri. Kongres yang diselenggarakan di Rengat pada tanggal 31 Desember 1954 sampai dengan Januari 1955 ini menghasilkan rumusan yang berupa dukungan sepenuhnya terhadap hasil keputusan Kongres Pemuda Riau yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 1954 di Pekanbaru.

Selain kedua kongres di atas, ada kongres lain yang bertempat di Tanjungpinang. Kongres itu adalah yang dilakukan oleh Pemuda Riau Komsariat Kepulauan Riau.

Kongres yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1955 ini berhasil merumuskan sebuah tuntutan agar Keresidenan Riau ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonomi tingkat I.

Sementara itu, para wakil rakyat di lembaga legislatif yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) juga tidak berpangku tangan. Melalui sidang-sidangnya mereka tidak henti-hentinya memperjuangkan cita-cita pembentukan Propinsi Riau. Hasil yang diperoleh pada sidang pleno ke-8 DPRDS di Bengkalis yang dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 1955 misalnya berhasil merumuskan bahan-bahan konferensi DPRDS seluruh Indonesia (diantaranya tuntutan pembentukan Propinsi Riau yang telah didukung oleh empat daerah kabupaten) yang dilaksanakan di Bandung (berlangsung pada tanggal 10--14 Maret 1955).

Selain itu, pada pertemuan berikutnya yang diikuti anggota-anggota dari Bengkalis, Kampar, Inderagiri dan Kepulauan Riau di Tanjungpinang (26 Maret 1955), juga berhasil mengambil suatu keputusan untuk segera mengirim kawat kepada Menteri Dalam Negeri agar daerah Keresidenan Riau dijadikan daerah otonom tingkat I.

Pada tanggal 7 Agustus 1957 di Bengkalis juga dilangsungkan Konferensi DPRDS dari seluruh Keresidenan Riau yang terdiri atas empat kabupaten. Konferensi ini ber-hasil memutuskan antara lain, pengajuan resolusi kepada pemerintah pusat untuk menjadikan keresidenan Riau ditingkatkan statusnya sebagai daerah otonom tingkat I dan membentuk Panitia Persiapan Propinsi Riau (P3R) dari tingkat keresidenan hingga kabupaten (sub-sub panitia).

Berselang satu bulan kemudian, tepatnya pada 9 September 1957, di Jakarta dibentuk Badan Penghubung Persiapan Propinsi Riau (BP3R) oleh delegasi empat kabupaten. Badan ini diketuai oleh Wan Ghalib dengan tugas pokok menjalankan instruksi-instruksi P3R di Pekanbaru dan menghubungi pemerintah pusat dalam rangka usaha terbentuknya Propinsi Riau. Serta menghimpun sumber

daya masyarakat Riau khususnya, termasuk mereka yang bersimpati terhadap upaya pembentukan Propinsi Riau yang berada di luar daerah Riau.

Kiranya perlu diketahui bahwa yang berjuang untuk mewujudkan Riau terpisah dari Propinsi Sumatera Tengah dan menjadi propinsi tersendiri tidak hanya para pemuda dan para tokoh masyarakat, tetapi juga masyarakat Riau sendiri. Dalam hal ini para tokoh masyarakat berupaya untuk mengajak masyarakat berperan aktif, untuk itu perlu diselenggarakan kongres rakyat. Caranya ialah dengan menciptakan jaringan komunikasi ke seluruh kabupaten di Keresidenan Riau yang berlangsung dari tanggal 31 Januari hingga tanggal 2 Pebruari 1956 di Pekanbaru.

Pelaksanaan kongres itu dapat dikatakan sangat sukses. Ini berarti masyarakat sangat mendukung (berperan serta aktif). Ini tercermin dari kutipan sebagai berikut:

“sangat menarik hati sekali keadaan dan suasana sewaktu kongres tersebut dilangsungkan. Kota Pekanbaru kelihatan sibuk menerima tamu-tamu yang datang dari seluruh daerah. Ada yang datang memang mendapat undangan sebagai utusan atau peninjau dan ada pula yang datang karena ingin melihat saja. Pemuda-pemuda mengerahkan tenaganya membantu panitia dengan tidak mengenal lelah. Hotel-hotel penuh sesak, begitu juga rumah-rumah penduduk sibuk menerima tamu-tamu yang datang dari seluruh daerah. Semuanya diliputi oleh semangat perjuangan yang meluap-luap dan suasananya seperti kembali pada jaman bersiap-siap pada permulaan revolusi kemerdekaan. Semuanya bersatu tekad untuk berjuang membina Propinsi Riau. Sekiranya pada waktu itu ada orang-orang yang berani menentang atau mencemooh gerakan tersebut, kontan orang-orang itu akan disikat habis oleh pemuda-pemuda yang sudah meluap itu” (Pemda Tk. I Riau, 1976: 643)

Kutipan di atas sekali lagi menunjukkan pada kita bahwa kongres rakyat Riau ini mendapat dukungan yang luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat daerah keresidenan Riau.

Seluruh wakil ke empat kabupaten hadir dan mengikuti acara demi acara secara serius. Utusan-utusan itu terdiri atas 69 orang dari kabupaten Inderagiri, 48 orang dari Kepulauan Riau, 89 orang dari Kabupaten Bengkalis dan 70 orang dari Kabupaten Kampar. Disamping itu kurang lebih ada 300 orang peninjau dari berbagai daerah dan 51 orang panitia penyelenggara. Sedangkan, dari pihak pemerintah yang hadir adalah Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Muljohardjo beserta stafnya, para bupati, anggota-anggota DPD dan tidak ketinggalan dua orang utusan dari Jambi sebagai peninjau.

Tiga hari setelah kongres maka para peserta berhasil mengambil kesimpulan kurang lebih sebagai berikut:

- 1) menuntut supaya daerah Riau yang meliputi kabupaten: Kampar, Bengkalis, Inderagiri dan Kepulauan Riau segera dijadikan daerah otonomi tingkat I (propinsi).
- 2) Bahwa yang dimaksud dengan "Rakyat Riau" adalah bangsa Indonesia yang berdiam di daerah Riau, mereka yang tinggal di daerah ini karena pekerjaan dan penghidupannya serta yang berumah tangga di daerah ini dengan tidak memandang suku bangsanya. Karena itu suku-suku bangsa Kalimantan, Sulawesi, Jawa yang berada di Inderagiri Hilir adalah termasuk rakyat Riau dan kepada segenap suku bangsa Indonesia yang berdiam dan bermahatangga di daerah ini diminta ikut serta memperjuangkan Propinsi Riau ini, dan
- 3) Usaha-usaha untuk melaksanakan tujuan itu meliputi: membuat dan mengirimkan resolusi kepada pemerintah dan DPR dan menugaskan kepada P3R untuk membuat nota penjelasan mengenai keputusan kongres, serta menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan guna mencapai pembentukan propinsi itu, kemudian juga menambah anggotanya dan badan penghubung yang telah ada di Jakarta untuk dipertahankan.

Selanjutnya, yang bertanggung jawab untuk memperjuangkan keputusan kongres kepada pemerintah pusat adalah P3R yang ada di Pekanbaru bekerja sama dengan BP3R yang ada di Jakarta. Ini artinya, dalam menghadapi pemerintah pusat, BP3R merupakan ujung tombak karena berada di garis depan. Sedangkan, P3R sebagai penggerak (motor) di daerah.

Mengingat tugas yang dibebankan demikian berat, ditambah dengan keinginan masyarakat Riau dalam mewujudkan daerahnya sebagai propinsi tersendiri sudah dapat dikatakan tidak terbendung lagi, maka BP3R di Jakarta pada 24 Oktober 1956 mengadakan konferensi pers yang dihadiri sebagian besar wartawan harian ibukota. Dalam kesempatan ini Wan Ghalib, selaku ketua menjelaskan panjang lebar tentang keinginan masyarakat Riau mengenai pembentukan daerah otonom tingkat I yang lepas dari Sumatera Tengah. Dikatakan bahwa apabila hal ini tidak segera terwujud sangat dikhawatirkan akan dapat berdampak kurang baik yang pada gilirannya dapat menyulitkan keadaan. Dikatakan pula bahwa ketegangan-ketegangan antara masyarakat daerah Riau dan Propinsi Sumatera Tengah, baik dalam pemerintahan maupun kepartaian, serta lainnya semakin meruncing, sehingga dikuatirkan daerah Riau tidak akan mengambil bagian dari pembentukan DPRD Peralihan Sumatera Tengah.

Sungguhpun usaha-usaha dari P3R di daerah maupun BP3R di Jakarta dalam meyakinkan pemerintah pusat tentang status daerah otonomi tingkat I itu tidak mengenal putus asa, namun mereka juga masih harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang menentang pembentukan propinsi ini. PKI misalnya mereka secara terang-terangan, menaruh curiga terhadap tuntutan pembentukan Propinsi Riau karena hal itu dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan itu dikemukakan oleh seorang pembicara (Noer Rauf) yang berasal dari Seksi Komite PKI Kampar dalam rapat umumnya yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 1956. Lebih dari itu Noer Rauf menambahkan bahwa mereka yang mendukung Kongres Rakyat Riau adalah orang-orang feodal

yang dimaksud mengembalikan Swapraja Siak, serta bekas kaki tangan Belanda.

Akan tetapi, pernyataan itu segera dibantah oleh H. Abdullahamid Yahya selaku ketua P3R. Ia mengatakan bahwa kongres ditanggung dan diikuti oleh utusan dari empat kabupaten dan utusan PKI Kampar tidak menghadiri kongres, sehingga tidak memahami pengertian tentang rakyat Riau. Dengan demikian tidak beralasan penilaian Noer Rauf itu. Justru yang terjadi adalah sebaliknya PKI-lah yang selalu berupaya mengadu domba dan memecah belah rakyat Riau, tetapi selalu menemui kegagalan.

Sementara itu pada tanggal 20 Desember 1956 di Ibukota Sumatera Tengah (Bukittinggi) terjadi pengambilalihan kekuasaan secara sepihak oleh dewan Banteng terhadap pemerintah daerah. Dalam hal ini Gubernur Ruslan Muljohardjo dijadikan sebagai "Ketua Daerah" oleh Ahmad Husein. Ahmad Husein mengatakan bahwa Riau dan Jambi memberi dukungan terhadapnya.

Berselang sehari sejak pernyataan itu dikumandangkan, apra tokoh BP3R di Jakarta dan para wakil veteran Riau melakukan pembicaraan yang serius guna menanggapi pernyataan tersebut. Hasilnya adalah bahwa mereka tetap berpijak pada hasil kongres Rakyat Riau. Sehubungan dengan itu, maka keluarlah pernyataan bersama (sebagai tanggapan atas pengambilalihan kekuasaan yang sepihak itu) kurang lebih sebagai berikut:

- 1) tindakan yang telah dan akan diambil Dewan Banteng terlepas dari persoalan daerah/rakyat Riau;
- 2) tidak meyakini bahwa tindakan Dewan Banteng akan memperjuangkan hasrat rakyat Riau, namun sebaliknya ia menghancurkan atau sekurang-kurangnya menghalangi terbentuknya Propinsi Riau; dan
- 3) karena Dewan Banteng mempunyai kekuatan maka sulit untuk menentang secara langsung. Dengan demikian

perjuangan menuntut Propinsi Riau yang sudah dilaksanakan sebelum adanya Dewan itu harus dilanjutkan secara bijaksana.

Tanggapan pada tokoh BP3R dan Veteran Riau tersebut membuat suasana menjadi tegang. Dengan adanya ketegangan itu, maka Komando Daerah Militer Sumatera Tengah (Letkol. Ahmad Husein) mendominasi seluruh Riau Daratan. Hanya daerah Kepulauan Riau yang terlepas dari jangkauan mereka, karena daerah ini berada di bawah Komando Daerah Maritim yang dipimpin oleh Letkol. (P) HP. Simandjutak. Akibatnya keadaan pemerintahan di daerah Riau semakin kacau balau. Untuk mengatasi hal itu pemerintah pusat melalui Mendagri melakukan tindakan darurat, dengan mengeluarkan instruksi berupa surat kawat kepada Residen Riau No. Skr.9/3/1 tanggal 2 Januari 1957 berisi sebagai berikut: segala urusan administrasi pemerintah di pusat, tidak perlu melalui Sumatera Tengah dan juga tentang urusan masalah otonomi daerah.

Berdasarkan instruksi Mendagri itu semakin jelaslah perhatian pemerintah pusat terhadap keinginan masyarakat Riau dan hal ini lebih diperkuat lagi dengan turunnya instruksi Perdana Menteri tanggal 1 Januari 1957 yang ditujukan kepada Residen Riau di Tanjungpinang yang berbunyi:

- Pertama : dengan mempergunakan dasar dari PP No. 27/1956, residen mengkoordinasi semua jawatan vertikal sipil yang ada di daerah keresidenannya dari tingkat keresidenan maupun dari tingkat propinsi apabila yang demikian ini ada seperti Inspeksi Jawatan Perikanan Laut Propinsi Sumatera Tengah di Tanjungpinang.
- Kedua : dengan memperhatikan ketentuan sub pertama selanjutnya jawatan-jawatan dimaksud berhubungan langsung dengan pusat kementeriannya masing-masing.
- Ketiga : para menteri telah diberi tahu.

Berdasarkan instruksi-instruksi dari pusat itu maka Mr. Sis Tjakraningrat selaku Residen Riau dapat bertindak dengan tegas menjalankan *bestuure beleid* di seluruh daerah keresidenan yang ia pimpin. Meskipun dengan konsekuensi harus berlawanan dengan Dewan Banteng, disamping para panitia Sumatera Tengah yang juga sering disebut Ninik-mamak. Mereka yang terakhir ini secara terang-terangan menentang upaya pembentukan Propinsi Riau terpisah dari Sumatera Tengah. Namun demikian, para anggota Badan Penghubung dan Ikatan Warga Riau serta IPIR tetap tegar dalam pendiriannya demi terwujudnya Propinsi Riau.

Dalam perkembangannya, melalui sidang kabinet pada 1 Juli 1957 akhirnya dapat disetujui pemberian status Propinsi Riau dan Jambi. Sehubungan dengan itu, pada 8 Juli 1957 para delegasi Riau ke Jakarta. Delegasi itu diketuai oleh Mr. Sis Tjakraningrat, dengan beberapa anggota seperti: Muchtar Husin, Dt. Wan Abdulrahman, T. Kamarulzaman, Wan Ghalib, DM. Janur, Umar Awaluddin, dan A. kadir Mahidin.

Selanjutnya pada 28 Juli 1957 delegasi melakukan pertemuan dengan Badan Penghubung untuk menghadap Wakil Ketua Dewan Nasional, KSAL, dan Menteri Dalam Negeri, serta Perdana Menteri Djuanda dengan misi agar segera dapat diwujudkan pembentukan Propinsi Riau.

Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1957 melalui sidang kabinet Undang-undang Propinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi dapat disetujui oleh sidang. Selanjutnya pada 9 Agustus 1957 diundangkan dalam berita negara No. 75 dengan Undang-undang No. 19 tahun 1957.

Akhirnya, pada 5 Maret 1958 sebagai realisasi dari Undang-undang pembentukan ketiga propinsi itu Mr. SM. Amin dilantik sebagai gubernur pertama di Propinsi Riau oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Depdagri (Mr. Sumarman) bertempat di gedung daerah Tanjungpinang. Sejak saat itu resmiah daerah Riau sebagai propinsi (Propinsi Riau) yang beribukota di Tanjungpinang.

Catatan Bab III

13. Untuk barang-barang yang berasal dari dalam negeri, jika masuk ke Kepulauan Riau tetap dikenakan bea cukai.
14. Pendirian Dewan Banteng di Padang tampaknya menggugah mereka yang ada di daerah lain, karena setelah dewan tersebut berdiri, muncul dewan-dewan yang lain seperti: Dewan Gajah, Dewan Garuda, di Palembang, dan Dewan Manguni di Manado.
15. Propinsi Sumatera Tengah wilayahnya meliputi daerah: Riau, Jambi, dan Sumatera Barat sekarang. Ibukotanya adalah Bukit Tinggi.

BAB IV

KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU PADA MASA DOLLAR

4.1 Pengantar

Daerah Tingkat II Kepulauan Riau memiliki arti tersendiri, tidak hanya bagi seseorang yang lahir dan besar di daerah yang bersangkutan, akan tetapi juga bagi para pendatang. Ada berbagai faktor yang menyebabkan hal itu. Satu diantaranya, dan yang kami anggap sangat penting dalam penelitian ini adalah karena masyarakatnya telah mengenyam suatu masa yang disebut sebagai “zaman dollar”¹.

Mata uang asing (dollar Singapura dan Malaysia) dari zaman penjajahan, kemerdekaan, hingga pembangunan nilainya tidak pernah dibawah rupiah; mereka selalu berada di atas rupiah (nilainya lebih tinggi dibandingkan rupiah). Mungkin bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal diberbagai pelosok pedesaan, mereka kurang atau bahkan tidak peduli tentang tinggi rendahnya nilai rupiah terhadap dollar; sebab dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan mata uang rupiah dalam memperoleh barang dan jasa. Akan tetapi bagi masyarakat Kepulauan Riau tidaklah demikian, karena di dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan dollar di dalam memperoleh barang dan jasa. Bayangkan, jika saudara kita yang ada di Kepulauan Riau ini membelanjakan uangnya yang dollar itu di luar Kepulauan

Riau. Tentunya mereka akan menganggap “kecil”, karena dengan hanya beberapa dollar mereka dapat memperoleh barang dan jasa yang cukup berarti. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada masa itu orang dari Kepulauan Riau agak diperlakukan khusus oleh orang-orang yang berada di luar Kepulauan Riau. Ini artinya bahwa pada masa itu orang-orang Kepulauan Riau hidup dalam “kemakmuran”. Untuk mengeta-hui bagaimana kehidupan sosial ekonomi pada masa itu berikut ini akan kami ketengahkan beberapa kasus. Namun, sebelumnya perlu kami kemukakan bagaimana pola jaringan sosial, ekonomi dan penggunaan mata uang rupiah.

4.1.1 Pola Jaringan Sosial

Peranan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional adalah suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Bukan hanya di zaman dahulu tetapi juga sekarang. Selat Malaka bahkan tergolong lalu lintas laut tang paling sibuk di dunia setelah Selat Dover di Inggris. Di Selat inilah kapal-kapal dagang, baik bangsa barat maupun timur, mendistribusikan berbagai jenis komoditinya.

Fungsi Selat Malaka yang tidak hanya sebagai tempat transaksi (jula-beli barang dan atau jasa), tetapi juga sebagai tempat pengisian bahan bakar dan atau perbekalan air serta konsumsi lainnya guna melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya selat (pelabuhan) tersebut sering disebut sebagai “Pelabuhan Transit” dan atau “Bongkar Muat”. Peranan dan fungsi Selat Malaka yang demikian vital dalam dunia perdagangan dan atau pelayaran ini pada gilirannya membuat berkembangnya bandar-bandar di sekitar selat tersebut. Hal, ini sangat menguntungkan bagi daerah Kepulauan Riau yang secara geografis wilayahnya berdekatan, bahkan berbatasan dengan Selat Malaka. Keuntungan itu tercermin dari semakin semaraknya perekonomian Kepulauan Riau. Untuk itu, tidak berlebihan jika Lutfi (1977) mengatakan bahwa perkembangan bandar-bandar di sepanjang Selat Malaka, terutama Singapura, membawa pengaruh perubahan yang cukup pesat pada

perekonomian Kepulauan Riau. Sehingga berbagai aktivitas masyarakatnya semakin bervariasi, karena daerah Kepulauan Riau cenderung sebagai daerah *hinterland*, dimana barang-barang yang keluar dari pelabuhan Singapura dikonsumsi atau wilayah konsumen barang-barang import. Dalam arti yang lebih umum, wilayah belakang dapat mengacu kepada sumber-sumber bahan atau produksi yang akan dikeluarkan melalui pelabuhan untuk keperluan *eksport*. Sebagai *hinterland* masyarakat Kepulauan Riau banyak melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan ekonomi internasional seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan perdagangan. Perkebunan yang mereka usahakan pada umumnya yang dapat diperdagangkan di pasaran dunia seperti kelapa, karet dan cengkeh. Sedangkan untuk kebutuhan pokoknya mengimport dari Singapura.

Komoditi perdagangan yang diperkirakan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat Kepulauan Riau adalah karet (masyarakat Kepulauan Riau menyebutnya *getah*). Ini tercermin dari perkebunan yang paling luas dan paling banyak diusahakan oleh rakyat. Walaupun pada masa pendudukan Jepang hingga Perang Dunia II sempat terganggu, namun setelah kemerdekaan perkebunan ini bangkit kembali. Tampaknya itu dapat dimaklumi karena pada zaman penjajahan (Belanda) hingga kemerdekaan tanaman tersebut hasilnya sangat menjanjikan. Bahkan di zaman kemerdekaan harganya sangat tinggi. Ini ada kaitannya dengan berperannya kembali Bandar Singapura sebagai pusat perdagangan di tahun 50-an. Malahan tahun 60-an harga karet mengalami pelonjakan yang relatif tinggi, harga yang pada mulanya hanya 2,5 dollar persekati menjadi 5,00 dollar persekati (naik 100%). Padahal sebagai perbandingan harga bursa pada masa itu 0,05 dollar per-sekati.

Di sisi lain, semenjak pemulihan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia, sistem perdagangan di daerah Riau diatur sepenuhnya oleh pemerintah ke dalam tiga sistem perdagangan, khususnya perdagangan luar negeri. Untuk Riau Daratan (daerah Bengkalis) sistem yang diterapkan adalah *barter*

consignasi (BC), khususnya untuk *eksport* ke Singapura. Sedangkan daerah Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu diberlakukan sistem *Letter of Credit* (LC). Prosedur *eksport* dan *import* didaerah barter sangat sederhana, karena para eksportir sekaligus dapat menjadi importir.

Jenis-jenis komoditi tertentu yang di ekspor ke Singapura melalui pelabuhan-pelabuhan yang telah ditentukan, seperti Siak, Bengkalis, Selat Panjang, dan Bagan Siapi-api. Hasil ekspor yang berupa devisa (dollar) 30% dikuasai langsung oleh para eksportir dengan ketentuan harus digunakan untuk mengimpor barang-barang konsumsi dalam negeri, yang meliputi: 10% beras, 10% barang-barang esensial lainnya, dan 10% barang-barang bebas. Beras dan barang esensial lainnya harus dimasukkan melalui pintu pelabuhan asal, sedangkan barang-barang bebas dapat dimasukkan secara bebas melalui pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Sedangkan, sisa devisa (70%) dikuasai dan ditentukan oleh pemerintah.

Sistem ini dirasa sangat menguntungkan bagi rakyat terutama masyarakat daerah Kabupaten Begkalis, karena sebagai daerah yang tergolong minus kebutuhan akan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya menjadi lebih terjamin. Kemudian, pemerintah menganggap kebijaksanaan ini dirasa sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat, maka semenjak 1 September 19566 daerah barter diperluas hingga ke daerah Kabupaten Inderagiri Hilir, karena BC harga barang ekspor terutama karet lebih tinggi daripada daerah LC.

Kedua sistem tersebut (BC dan LC) tidak diberlakukan di daerah Kepulauan Riau karena daerah ini sejak zaman penjajah Belanda merupakan daerah *Buiten de Tolgebeid* (bebas bea cukai). Artinya, jaringan perdagangan dengan luar negeri, terutama dari dan ke Singapura, dapat dilakukan sebagaimana aktivitas perdagangan di dalam negeri sendiri dan mata uang yang berlaku secara sah adalah dollar Melayu/Singapura. Sehubungan dengan itu tidaklah berlebihan jika dikatakan daerah Kepulauan Riau menjadi satu wilayah ekonomi dengan Melayu/Singapura, sehingga barang-barang yang masuk dari

Singapura ke Kepulauan Riau apabila didistribusikan ke daerah Riau lainnya akan dikenakan cukai sebagaimana barang-barang dari laur negeri. Ini artinya Kepulauan Riau pada masa itu dapat dikatakan sebagai “distributor” barang-barang produksi bagi daerah-daerah sekitarnya, sehingga peranan daerah ini cukup menonjol. Dan masyarakat dapat menerima aksesnya dalam aktivitas ini, sehingga mereka menjadi makmur, mudah memenuhi segala kebutuhan sehari-harinya.

Peranan Kepulauan Riau sebagai daerah “distributor” barang-barang produk luar negeri karena daerah ini tidak memiliki pusat perdagangan. Sementara itu, Singapura merupakan pesaing tunggal bagi masyarakat Kepulauan Riau dengan beraneka ragam barang perdagangan. Sedangkan, ekspor perkebunan, meliputi: karet, kelapa, serai wangi dan ikan.

Perkebunan yang diupayakan oleh masyarakat Kepulauan Riau merupakan jenis usaha perkebunan rakyat dalam bentuk perorangan atau keluarga. Karet rakyat merupakan sumber utama kehidupan rakyat Kepulauan Riau disamping ikan sehingga apabila terjadi gangguan dalam perdagangan jenis komoditi itu akan berakibat terganggunya keadaan ekonommi masyarakat Kepulauan Riau secara keseluruhan.

Usaha wiraswasta, khususnya di bidang perdagangan, baik tingkat besar maupun kecil, umumnya didominasi oleh orang-orang Cina (keturunan). Pedagang pribumi umumnya hanya sebagai perpanjangan tangan mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan orang-orang Cina yang menguasai aktivitas ekonomi (pasar). Mereka umumnya menempati daerah-daerah yang “strategis” bagi usaha perdagangannya, seperti di daerah-daerah perkotaan, baik kota kabupaten, kecamatan maupun desa.

Adapun barang-barang dan atau jasa yang mereka usahakan, tidak hanya hasil perkebunan (karet), tetapi juga bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari, dapur arang, perdagangan ikan dan transportasi, terutama laut ke

Singapura. Hampir di seluruh kota pelabuhan yang strategis di daerah Kepulauan Riau dikuasai oleh para pedagang keturunan Cina. Dibeberapa tempat jumlah pedagang keturunan Cina sudah merupakan mayoritas, seperti Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Dabo Singkep, dan Tanjung Batu Kundur, sehingga sangat terasa bahwa mereka telah menjadi kekuatan ekonomi yang menentukan di kota-kota daerah Kepulauan Riau.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sistem perdagangan yang berlaku di daerah Kepulauan Riau berbeda dengan daerah-daerah lainnya (Riau Daratan). Mengapa demikian? Jawabnya adalah karena kota-kota di Kepulauan Riau mempunyai kelebihan dibandingkan kota-kota di luar Kepulauan Riau. Kota-kota di Kepulauan Riau jaraknya relatif dekat dengan negara tetangga (Malaysia dan Singapura sekarang). Jarak yang relatif dekat itu pada gilirannya membuat kemudahan di bidang transportasi baik orang maupun barang-barang produksi masyarakat ke pelabuhan transito Singapura. Oleh karena itu, para pedagang (khususnya keturunan Cina yang berperan sebagai perantara) dapat menjual barang-barang kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok sehari-hari, dengan harga yang relatif mudah dibandingkan dengan barang-barang yang dibawa pedagang dari daerah daratan Sumatera. Hal itu disebabkan antara lain karena jaraknya sangat dekat ditambah dengan tidak adanya biaya cukai.

Petani karet yang kebanyakan adalah pribumi (orang Melayu) tidak dapat berbuat banyak dalam pemasaran. Jika karetnya telah menghasilkan mau tak mau mereka menjualnya kepada taoke orang Cina. Dan ini sangat mudah dilakukan karena biasanya para taoke berada di perkampungan yang tidak jauh dari perkebunan. Langkanya penampung yang Non-Cina membuat kedudukan taake semakin kuat, sehingga mereka dapat menetapkan harga secara sepihak.

Setelah barang-barang terkumpul, mereka membawanya ke pelabuhan untuk diserahkan kepada taoke dan pialang yang lebih besar. Perlu diketahui bahwa antara taoke yang berada

di pedesaan (perkampungan) dan taoke yang berada di pelabuhan (kota) seringkali masih ada hubungan keluarga. Mereka khususnya para taoke yang berada di pelabuhan (kota) tadi mempunyai tidak hanya transportasi darat tetapi juga laut seperti: pompong, sampan dan kapal dagang (cargo) yang terbuat dari kayu dan menggunakan layar yang disebut tongkang. Alat transportasi inilah yang mereka gunakan untuk membawa barang dagangannya ke Singapura. Selain itu rumah mereka pun berada di pantai (sepanjang pantai) yang tidak jauh dari pelabuhan. Di samping rumah tinggal, rumah tersebut berfungsi sebagai gudang. Di situlah barang-barang dagangan ditampung sebelum dibawa ke Singapura.

Pengangkutan ke Singapura biasanya dilakukan pada malam hari. Hampir setiap hari mereka mengirim barang ke Singapura. Di sana sudah ada yang menampung (orang Cina juga yang sudah saling percaya), sehingga keesokan harinya mereka dapat pulang dengan membawa barang dagangan pula (kebutuhan pokok masyarakat).

Pada bagian atas telah kami sebutkan bahwa para petani karet sebagian besar adalah orang pribumi. Namun demikian, bukan berarti bahwa mereka memiliki kebun yang luas. Umumnya mereka mempunyai kebun yang sempit (kecil) apalagi dibandingkan dengan yang dikuasai Cina dan para bangsawan Melayu. Luasnya tanah yang dimiliki Cina dan para bangsawan ini membuat mereka tidak sanggup untuk mengerjakan sendiri. Mereka memerlukan tenaga kerja dan kebanyakan adalah orang Jawa perantauan.

Orang Cina memiliki kebun dengan sistem "pajak" (sewa), yaitu menyewa untuk beberapa tahun. Jika waktu sewa habis, mereka mencari tempat lain. Demikian seterusnya sehingga mereka berkeliling ke pelosok-pelosok kepulauan guna memperlancar usahanya. Sementara itu pohon karet yang sudah tidak menghasilkan lagi, ditebang oleh pemiliknya, dijadikan kayu bakar, kemudian ditanami kembali (peremajaan). Selain tanaman karet yang diusahakan oleh para petani adalah cengkih, kelapa. Disamping itu mereka juga

memanfaatkan pekarangan dengan berbagai tanaman, seperti: duku, durian, manggis, rambutan, pisang, dan palawija.

Masyarakat Midai, Sedanau, Serasan, dan beberapa pulau lain disekitarnya, pada mulanya menanam cengkeh hanya sebagai tanaman sisipan di antara kebun kelapa. Namun sejak tahun 60-an cengkeh dijadikan sebagai tanaman utama. Hasilnya dijual langsung ke Singapura atau Malaysia karena harganya lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Sedangkan, kelapa biasanya mereka jual kepada taoke yang berada di daerahnya, sekaligus membeli kebutuhan sehari-hari. Soemargono (1992) menginterpretasikan bahwa itu terjadi karena tidak adanya pasar khusus di daerah Kepulauan Riau (Soemargono K, ed, 1992: 193-199).

Selain di perkebunan banyak juga yang bekerja sebagai nelayan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir. Kebanyakan nelayan-nelayan ini adalah orang-orang non-Cina seperti: Melayu, Bugis, Banjar dan masyarakat terasing (Suku Laut). Namun demikian, bukan berarti bahwa orang-orang Cina tidak menyentuhnya. Memang mereka tidak secara langsung memancing, menjala, menombak dan membuat *kelong*¹⁶⁾ di laut. Akan tetapi, mereka menyediakan berbagai peralatan yang digunakan untuk menangkap atau memelihara ikan, seperti pukot, sampan, dan uang. Ini artinya bahwa nelayan yang dilakukan oleh orang-orang non-Cina kebanyakan “nelayan buruh” karena umumnya mereka tidak memiliki alat-alat produksi yang memadai, kecuali tenaga. Sehubungan dengan itu banyak di antara mereka yang menggunakan pukot (milik orang Cina) dengan sistem bagi hasil. Dalam hal ini pemilik perahu mendapat 30%, sedangkan “penyewa” mendapat 70%. Ini artinya bahwa mereka terikat oleh taoke. Nelayan penyewa seperti ini biasanya sekaligus berperan sebagai tengkulak atau pengumpul hasil produksi para nelayan lain. Mereka oleh taokenya diberi berbagai kemudahan, seperti pinjaman yang berupa uang dan atau barang yang dibayar pada saat pembagian hasil tangkapan ikan. Model seperti ini bukan sesuatu baru bagi para nelayan.

Di sisi lain, taoke selaku tengkulak atau pengumpul, telah memiliki jaringan yang cukup rapi dengan pedagang ekspor atau pedagang antar pulau. Para pedagang inilah yang kemudian menjual kembali kepada pedagang besar (agen) di Singapura. Agen meneruskan kepada pedagang menengah. Dan oleh pedagang ini sebagian didistribusikan ke toko-toko atau pasar ikan dan sebagian lagi diserahkan kepada pengecer.

Nelayan yang tidak terikat oleh taoke adalah nelayan yang memiliki alat produksi sendiri, seperti perahu layar beserta pancing dan jaringnya. Mereka yang termasuk dalam kategori ini biasanya menangkap ikan sendirian atau dibantu oleh anak isterinya.

Satu faktor yang menyebabkan para nelayan menjual hasil tangkapannya dengan harga yang murah adalah karena pada saat itu (pada masa dollar) daerah Tanjungpinang belum memiliki pelabuhan, yang memadai bagi bongkar dan muat hasil laut, tempat pelelangan dan pabrik es, sehingga ikan yang telah ditangkap tidak dapat bertahan lama.

4.2 Pola Jaringan Perdagangan Masyarakat Kepulauan Riau

Hubungan ekonomi antar penduduk Malaya (Malaysia dan Singapura) telah terjalin berabad yang lampau. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika para ahli sering menyebut bahwa antar daerah Kepulauan Riau dan Malaysia serta Singapura merupakan kesatuan ekonomi. Penduduk di ketiga kawasan itu saling membutuhkan. Mereka yang berada di Malaysia dan Singapura membutuhkan hasil pertanian dan ikan dari orang-orang Kepulauan Riau. Sedangkan, orang-orang Kepulauan Riau membutuhkan barang-barang kebutuhan sehari-hari dari Malaysia dan Singapura. Inilah kemudian Mubyarto dkk, sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan, mengatakan bahwa program Sijori dan atau IMS-GT sebagai pengulangan hubungan ekonomi dimasa lampau. Oleh karena itu, tidak terlalu mengejutkan jika penduduk di tiga kawasan itu menggunakan mata uang yang sama (dollar Singapura dan

Malaysia dan bukannya rupiah, walaupun secara politik ketiga kawasan itu menjadi daerah kolonial yang berbeda (Kepulauan Riau yang merupakan bagian dari Indonesia termasuk jajahan Belanda, sementara Malaysia dan Singapura jajahan Inggris).

Pada bagian atas telah digambarkan bahwa orang Non-Cina (Melayu dan lain sebagainya) umumnya bekerja sebagai petani dan nelayan. Kemudian, orang Cina umumnya berperan sebagai pedagang perantara. Kalau toh mereka menyewa perkebunan tenaga kerjanya adalah orang-orang non-Cina. Kedudukan Cina sebagai *touke* dan sekaligus pedagang perantara membuahakan hubungan saling ketergantungan, tetapi mereka berada pada pihak yang kuat karena mempunyai modal yang kuat, sehingga mereka dapat leluasa menentukan harga. Jika hubungan tersebut disebut sebagai "patron and clien" tampaknya tidak seluruhnya benar, sebab didalam patron and clien sang patron berusaha untuk mensejahterakan cliennya. Namun, jika dikatakan "sistem ijon" juga tidak seluruhnya benar.

Mengingat hubungan ekonomi yang pernah terjadi antarpenduduk di tiga kawasan itu pemerintah Indonesia menerapkan sistem ekonomi yang berbeda dengan wilayah lainnya. Dan ini berlaku sampai adanya kebijakan moneter tanggal 15 Oktober 1963. Kedudukan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia memang sangat menguntungkan bagi masyarakat Kepulauan Riau, karena masyarakatnya walaupun melalui mata rantai yang cukup panjang dapat menjual karet, kelapa dan cengkehnya. Namun, dibalik keuntungan itu terdapat keburukannya yaitu kegiatan ekonomi masyarakat hanya tertuju pada komoditi bahan mentah yang diperlukan negara melalui perdagangan internasional (Djojohadikusumo, 1955).

Sebagai contoh kasus-kasus yang sering dialami oleh masyarakat Kepulauan Riau yang banyak berorientasi pada komoditi perkebunan (karet, kelapa dan cengkih) sangat tergantung pada perdagangan dunia. Apabila terjadi *over* produksi, maka masyarakat akan mendapat dampak langsungnya. Kasus yang sering dialami adalah permintaan

akan karet tiba-tiba terhenti sebagai akibat stok dunia penuh. Kasus seperti ini merupakan pukulan yang berat bagi daerah penghasil karet seperti Kepulauan Riau. Masyarakat yang telah terbiasa dengan pola hidup yang tergolong mewah tiba-tiba kehilangan penghasilannya. Akibatnya, bidang moneter terpengaruh karena *income* menjadi kecil.

Keadaan alam Kepulauan Riau yang tidak cocok untuk tanaman lain (persawahan) membuat kedudukan Singapura semakin kuat, sebab kebutuhan pokok yang didatangkan dari Singapura lebih murah bila dibandingkan dari daerah lain.

Sebagai daerah yang tidak menghasilkan jenis komoditi makanan pokok masyarakat Kepulauan Riau merasakan dampak yang kurang menguntungkan terhadap harga-harga jenis komoditi ini. Fluktuasi harga tidak bisa dihindari, sehingga terkesan harga standar sering diabaikan oleh para pedagang, lebih-lebih apabila terjadi keterlambatan penyuplai, dapat diduga dengan pasti harga kebutuhan pokok akan langsung meroket. Akan tetapi, biasanya situasi semacam ini tidak berlangsung lama, dan akan segera normal kembali setelah iklim normal (membaik). Kondisi geografis daerah kepulauan memang demikian, pada musim-musim tertentu terjadi gelombang besar sehingga pendistribusian kebutuhan pokok terganggu.

Pola ekonomi masyarakat yang berada pada jalur perdagangan berpengaruh terhadap struktur sosialnya. Masyarakat Kepulauan Riau berada pada posisi strategis dari arus jalur kemajuan dan pembaruan yang datang dari berbagai negara, sehingga masyarakat menjadi semakin terbuka terhadap nilai-nilai baru. Akan tetapi daerah ini tidak cukup mampu dalam memanfaatkan keberadaannya sebagai daerah penyangga Singapura, sekalipun sudah sejak zaman kolonial orientasi ekonominya terarah ke bekas kolonial Inggris tersebut.

Sejak diperkenalkannya alat tukar uang oleh para pengusaha perkebunan dari bangsa Eropa, maka uang makin dikenal dalam bidang kehidupan hingga saat ini. Akan tetapi mata uang yang beredar di daerah Kepulauan Riau pada saat

itu adalah dollar Singapura/Malaysia sebagai alat pembayaran yang sah, yang menyatukan ekonomi masyarakat Kepulauan Riau dengan Singapura/Malaysia (Lutfi, 1977: 47--48).

Sementara itu, masyarakat yang bermukim didaerah pedalaman mempunyai bentuk keterikatan yang khusus yang dibangun sejak lama oleh para petani karet dan kelapa di daerah pedalaman dengan pedagang pengumpul atau perantara yang dikenal dengan sebutan touke. Mereka inilah yang bertindak sebagai penyalur. Dalam aktivitasnya (pada masa itu) masih sering dilakukan dengan sistem barter, yaitu para touke sekaligus sebagai penyedia bahan kebutuhan pokok masyarakat. Para petani dalam penukarannya tidak dengan mata uang, tetapi dengan hasil perkebunannya seperti karet dan kelapa dan sebagainya lagi memang ada yang dibayar kemudian. Ini artinya, peranan para touke sama seperti tengkulak, tetapi tidak ada penekanan harga, sehingga tercipta timbal balik yang saling menguntungkan (*simbiotik mutualis*).

Jaringan perdagangan yang terjadi didaerah Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh faktor geografisnya didaerah ini yang sangat dekat dengan Singapura. Dalam kenyataannya untuk mengatur aktivitas perdagangan masyarakat di daerah ini dengan Singapura sangat sulit, karena pada umumnya masyarakat melakukannya secara illegal. Jarak tempuh antara Kepulauan Riau dengan Singapura sangat singkat. Para pedagang menggunakan perahu layar hanya ditempuh dalam waktu kurang lebih setengah hari (6 jam). Para pedagang Kepulauan Riau biasanya ke Singapura berangkat pada malam hari dan kembali lagi ke Kepulauan Riau pada sore harinya, kecuali daerah-daerah tertentu memakan waktu agak lama yaitu sekitar dua hari.

4.3 Penggunaan Mata Uang Rupiah Kepulauan Riau Sebagai Alternatif Pengganti Dollar.

Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa pada tahun 1963 antara Indonesia dengan Malaysia terjadi ketegangan politik yang dikenal dengan konfrontasi. Sikap

konfrontasi Indonesia muncul setelah Malaysia resmi didirikan pada tanggal 26 September 1963. Menurut pandangan pemerintah Indonesia pembentukan federasi Malaysia tersebut mengabaikan pemerintah Indonesia, karena Indonesia tidak dilibatkan dalam perundingan proses pembentukannya. Karena Indonesia sabgai kekuatan terbesar di kawasan Asia Tenggara, menurut Presiden Soekarno seharusnya dilibatkan langsung dalam menentukan perkembangan-perkembangan yang terjadi di kawasan ini (Gede Agung, 1973: 446--467).

Sehubungan dengan itu, maka Indonesia secara resmi telah memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaysia. Hal ini bertujuan agar mampu mematahkan kedudukan Singapura sebagai kepentingan Malaysia dan Inggris. Oleh karenanya, Indonesia juga melarang kapal-kapal dari Singapura dan Semenanjung beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Untuk menyaingi Singapura sebagai pelabuhan bebas, Indonesia juga berusaha membangun pelabuhan bebas sendiri yang diharapkan mampu menyedot arus perdagangan dari Singapura. Pelabuhan Sabang yang terletak di bagian ujung utara Pulau Sumatera ditetapkan sebagai pelabuhan bebas, disamping Belawan, Tanjung Priok, dan Makassar sebagai wilayah perdagangan bebas. Perusahaan-perusahaan milik Malaysia dinasionalisasi dan ekspor karet yang sudah diolah dilakukan langsung dari Sumatera. Selain itu pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan mata uang dollar Malaysia/Singapura sebagai alat pembayaran yang sah bagi masyarakat Kepulauan Riau. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 230 tahun 1963.

Tindakan-tindakan ekonomi dalam rangka konfrontasi ekonomi itu, tertuang dalam berbagai peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah serta keputusan Presiden. Sebenarnya hal itu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena saling berkaitan satu sama lain. Sekumpulan peraturan-peraturan yang dikeluarkan ini sebenarnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu ditujukan demi kepentingan dan

pertimbangan politik konfrontasi terhadap Malaysia. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan ekonomi yang ditempuh pemerintah Indonesia itu kurang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan dan pertimbangan ekonomi.

Daerah Kepulauan Riau tidak terlepas dari tindakan-tindakan itu. Sebagai langkah nyata pemerintah pusat telah mengambil tindakan dramatis dalam bidang moneter, yaitu menghapuskan berlakunya mata uang dollar Singapura/Malaysia di daerah Kepulauan Riau. Selanjutnya digantikannya dengan Rupiah Kepulauan Riau (KR. Rp) yang mulai berlaku pada 15 Oktober 1963. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan alasan sebagai usaha mendedolarisasikan daerah tingkat II Kepulauan Riau. Sebagai tindakan peralihan dianggap perlu untuk menetapkan satuan uang rupiah yang khusus berlaku di seluruh daerah tingkat II Kepulauan Riau, meliputi kewedanan-kewedanan: Tanjungpinang, Lingga, Karimun, dan Pulau Tujuh dengan nilai perbandingan yang sesuai untuk kestabilan moneter di wilayah Kepulauan Riau. Oleh karenanya, pemerintah memberlakukan satuan mata uang rupiah Kepulauan Riau (KR.Rp) dengan nilai perbandingan satu dollar US adalah sama dengan KR. Rp 3,06.

Saat berlakunya Peraturan Pemerintah bagi Daerah Tingkat II Kepulauan Riau bersamaan dengan berlaku alat pembayaran yang sah bagi daerah tersebut yaitu:

- 1) Uang kertas bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, khusus berlaku untuk seluruh daerah tingkat II Kepulauan Riau.
- 2) Uang kertas pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Khusus Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, dan
- 3) Uang logam yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan Khusus untuk Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.

Pemerintah Pusat mengedarkan mata uang kertas khusus daerah tingkat II Kepulauan Riau yang terdiri atas pecahan 1 dan 2,5 rupiah, bergambar Presiden Soekarno emisi 1961 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Notodiprodjo. Sedangkan emisi 1960 ditandatangani Gubernur Bank Indonesia MR. D. Soetikno Slamet dan Direktur Bank Indonesia MR. Indra Kusuma terdiri atas pecahan 5, 10 dan 100 KR. Rp dan uang logam 1, 5, 10,25, dan 50 sen. Berbagai jenis mata uang khusus yang berlaku di Kepulauan Riau di atas, berlaku pula sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Propinsi Irian Barat.

Untuk mempermudah peredaran mata uang KR.Rp dan penarikan dollar Singapura/Malaysia, Pemerintah Pusat pada 15 Oktober 1963 mengeluarkan peraturan tentang pembayaran gaji pegawai, baik pegawai negeri sipil maupun ABRI di daerah Tk II Kepulauan Riau dengan menggunakan uang KR.Rp dengan ketentuan sebagai berikut: 1) untuk jumlah Rp 500,00 untuk setiap Rp 100,00 dibayarkan KR.Rp 50,00; 2) untuk jumlah Rp 800,00 untuk setiap Rp 100,00 dibayarkan KR. Rp 35,00 dan 3) untuk jumlah diatas Rp 1000,00 untuk setiap Rp 100,00 dibayarkan KR. Rp. 30,00.

Catatan Bab IV

- 1) Pada saat penulisan laporan ini Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Satu dollar Amerika yang beberapa tahun yang lalu berkisar Rp 3000,00, kini berkisar Rp 5000,00. Bahkan pernah mencapai Rp 6000,00. Sementara itu satu dollar Singapura yang beberapa tahun yang lalu hanya sekitar Rp 1000,00 kini mencapai sekitar Rp 3000,00. Sedangkan, satu dollar Malaysia (Ringgit) yang beberapa tahun yang lalu hanya sekitar Rp 800,00 kini mencapai sekitar Rp 1000,00.



BAB V

DAMPAK KEBIJAKSANAAN MONETER OKTOBER 1963 DI KEPULAUAN RIAU

5.1 Reaksi Pemerintah Daerah Kepulauan Riau

Ketika pemerintah Republik Indonesia (pusat) memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Malaysia/Singapura, bahkan kemudian ditingkatkan dengan konfrontasi ekonomi, yang paling awal merasakan dampaknya adalah daerah Riau. Karena daerah ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura dan sejak berabad-abad orientasi ekonomi masyarakatnya sangat tergantung pada Malaysia dan Singapura. Bagi Riau Malaysia/Singapura adalah penampung hasil utama produksi pertanian (perkebunan dan perikanan) rakyat Riau. Di samping itu Malaysia dan Singapura merupakan pemasok kebutuhan pokok masyarakat Kepulauan Riau. Oleh karenanya, masyarakat Riau merasakan konfrontasi itu sebagai pukulan yang dahsyat khususnya di bidang ekonomi.

Untuk mengantisipasi kondisi yang demikian berat ini Gubernur segera mengadakan rapat kilat bersama para anggota Badan Pekerja Harian (BPH) dan instansi-instansi yang terkait. Rapat membahas situasi yang gawat saat itu serta realisasi kebijaksanaan pemerintah pusat yang berkenaan dengan daerah Riau, terutama Kepulauan Riau dan dicarikan solusinya untuk mengatasi keadaan yang gawat ini. Selanjutnya, Gubernur menugaskan seorang anggota BPH untuk menyusun

suatu konsep program yang meliputi semua bidang kecuali bidang pertahanan. Konsep tersebut harus selesai dalam satu malam, karena akan dibicarakan esok paginya dalam rapat. Ternyata rapat berhasil menyetujui konsep-konsep yang telah dipersiapkan secara bulat (Lutfi, 1977: 703). Langkah selanjutnya adalah membentuk delegasi yang bertugas untuk menyampaikan program-program itu kepada pemerintah pusat. Delegasi tersebut terdiri atas: Dt. Wan Abd. Rahaman (Wagub), Mayor M. Zazuli, dan Wan Ghalib. Delegasi menyampaikan usulan itu dalam sidang Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR) yang pada waktu bertindak sebagai "super kabinet", dipimpin oleh Wakil Panglima Tertinggi Dr. J. Leimena. Usulan program diterima dengan baik dan pelaksanaannya akan diatur serta dilaksanakan dibawah komando *Tash Force* yang akan dibentuk. (Lutfi, 1977: 704). Adapun usulan itu yakni: mengharapkan tindakan-tindakan pemerintah pusat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh rakyat, yaitu tentang pengiriman bantuan bahan pokok untuk daerah Kepulauan Riau dan menyalurkan hasil produksi perkebunan rakyat (karet) yang menumpuk "*ploting shop*". Hasil produksi direncanakan akan diangkut dengan dua kapal PELNI.

Di samping itu, untuk menanggulangi keadaan ekonomi, ditingkat pusat dibentuk komando tertinggi urusan ekonomi (KOTOE) di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri I Dr. Soebandrio. Sedangkan di Riau Gubernur Kaharudin Nasution ditunjuk sebagai pembantu KOTOE. KOTOE kemudian menunjuk PT. Karkam dengan hak monopoli dalam menampung seluruh produksi perkebunan rakyat, untuk selanjutnya dieksport.

Sehubungan dengan keadaan gawat saat itu, pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau mengambil langkah-langkah penggunaan kupon untuk pembelian bahan pokok. Langkah ini ditempuh agar masyarakat di daerah ini mendapatkan kebutuhan pokok secara merata. Sehingga tidak terjadi monopoli dalam penguasaan bahan pokok yang dampaknya

dapat mengakibatkan kenaikan yang sulit terkendalikan atas bahan pokok tersebut.

5.2 Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysai, karena itu orientasi ekonominya sangat tergantung terhadap kedua negara itu. Adanya perubahan-perubahan pola ekonomi secara mendadak menimbulkan berbagai keresahan di masyarakat. Antara lain perekonomian menjadi tidak menentu karena arus barang baik yang masuk maupun keluar tiba-tiba terhenti secara mendadak. Barang-barang produksi rakyat terutama karet menjadi menumpuk karena tidak dapat dieskpor. Begitu pula sebaliknya barang-barang kebutuhan pokok rakyat tidak dapat masuk. Kecuali yang didatangkan oleh pemerintah. Tetapi ini hanya cukup untuk kebutuhan rakyat di kota pelabuhan saja. Sehingga rakyat yang berada didaerah terpencil sangat sulit kehidupannya pada masa itu.

Untuk menanggulangi keadaan ekonomi yang runyam, Gubernur Riau Kaharuddin Nasution selaku pembantu KOTOE memberi hak monopoli kepada PT. Karkam untuk menampung seluruh produksi karet rakyat dan mengekspornya ke luar negeri. Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan bersama. PT Karkam pada awalnya hanya bergerak dalam bidang dagang biasa dan selama di Pekanbaru kurang dikenal oleh masyarakat luas. Tiba-tiba PT Karkam mendapatkan berbagai fasilitas dari KOTOE, sehingga pemilik perusahaan ini merasa seolah-olah lebih berkuasa dari Gubernur. Dengan seenaknya PT. Karkam mengambil alih karet-karet rakyat tanpa imbalan yang sesuai. Sehingga rakyat merasa karetnya disita perusahaan tersebut.

Pada waktu itu mata uang dollar Singapura/Malaysia masih dipakai sebagai alat pembayaran yang sah sambil menunggu penggantian uang khusus berlaku di Kepulauan Riau. Perdagangan rakyat di Kepulauan Riau dengan pedagang

Singapura masih berlangsung seperti masa-masa sebelumnya dalam negeri sendiri. Barang-barang yang masuk dari Singapura berupa kebutuhan pokok ke Kepulauan Riau bebas dari cukai. Tetapi apabila dari Kepulauan Riau dibawa ke daerah lain di Indonesia dikenakan cukai. Dengan demikian perniagaan yang berlangsung di Kepulauan Riau dengan Singapura merupakan perniagaan antara daerah (dalam satu negara), karena proses pembayarannya cukup dengan satu jenis mata uang yaitu dollar Singapura/Malaysia.

Kebijakan moneter Oktober 1963 yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia bagi masyarakat Kepulauan Riau merubah status perniagaan daerah ini dengan Singapura dan Malaysia dari perniagaan antar daerah berubah menjadi perniagaan internasional. Karena transaksi-transaksi perniagaan dilakukan harus dibayar dengan jenis mata uang yang berbeda. Transaksi-transaksi perdagangan sebelumnya tidak perlu memperhitungkan batas kedaulatan negara masing-masing. Setelah kebijakan moneter 1963 itu, semua menjadi berubah. Apabila sebelumnya perdagangan ditiga daerah tersebut tidak dikenakan bea masuk maka setelah kebijakan moneter itu terpaksa membayar pabean. Akibatnya, barang-barang yang dieskpor ke Singapura dikenakan bea dan peraturan-peraturan perniagaan yang tidak sama dengan Singapura. Faktor-faktor itu dengan sendirinya menimbulkan persoalan-persoalan baru bagi masyarakat Riau yang melakukan perdagangan antara kedua daerah itu.

Kebijaksanaan moneter itu dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk melarang kapal-kapal Singapura dan Malaysia beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Akibatnya perairan Indonesia khususnya perairan Riau kekurangan kapal. Ini menghambat kebijaksanaan moneter yang sedang dilaksanakan, karena hasil-hasil produksi pertanian rakyat Riau tidak dapat di eskpor ke Singapura.

Berbagai kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia yang dilakukan secara dramatis tersebut telah merubah struktur sosial ekonomi yang telah berlangsung cukup lama.

Singapura mempunyai kedudukan sebagai pusat pasar bagi masyarakat Kepulauan Riau. Sejak lama masyarakat Riau selalu berorientasi pada barang yang laku di pasar Singapura. Akibat terhambatnya ekspor hasil produksi perkebunan rakyat ke Singapura secara otomatis telah menghambat pula jaringan perdagangan yang telah ada. Dengan sendirinya hasil produksi masyarakat tidak dapat dijual karena perdagangan berhenti. Karet yang dihasilkan rakyat menjadi menumpuk. Para pedagang perantara yang berada di pedalaman tidak bersedia lagi membeli karet rakyat, sebab para pedagang itu sangat tergantung dengan para pedagang di kota-kota. Begitu pula halnya dengan bahan kebutuhan pokok yang selama ini didatangkan dari Singapura, juga terhenti sebagai akibat blokade ekonomi.

Tidak lama setelah kebijakan moneter diberlakukan oleh pemerintah, beberapa kota pelabuhan di daerah Kepulauan Riau menjadi sepi. Pelabuhan-pelabuhan seperti Tanjungpinang, Karimun, Lingga, Batam dan Pulau Tujuh berangsur-angsur menjadi sepi dari transaksi perdagangan, lebih-lebih dalam hal jual beli karet. Para pedagang toko tidak lagi membuka usahanya. Secara psikologis para pedagang terutama pemilik toko merasa enggan menerima pembayaran mata uang KR.Rp. pada umumnya para pedagang Tionghoa merasa khawatir bila tidak ada jaminan pada mata uang KR.Rp ini. Begitu pula dengan para petani perkebunan dan perikanan, mereka lebih suka menggunakan mata uang dollar Singapura. Karena dengan mata uang itu mereka lebih mudah melakukan transaksi jual beli berbagai jenis barang. Demikian pula dengan bahan pokok seperti kebutuhan masyarakat sehari-hari harganya melambung sampai 100%, bahkan tidak jarang dijumpai pedagang yang menaikkan harga barang sampai tiga kali lipat. Sebagai akibat kebijaksanaan moneter Oktober 1963 itu, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok. Sehingga semakin hari persediaan bahan pokok semakin menipis.

Sementara itu, PT. Karkam yang dapat menguasai karet rakyat sampai mencapai puluhan ribu ton tetap melakukan

ekspor tanpa melalui prosedur yang sebenarnya. Meskipun mereka mengumumkan bahwa karet rakyat tersebut diekspor ke Australia dan Amerika, namun kenyataannya lain. Karet-karet rakyat tersebut tetap diekspor ke Singapura. Padahal negara tersebut sedang diblokade perekonomiannya oleh pemerintah RI (Lutfi, 1977: 705). Sebaliknya barang-barang kebutuhan pokok yang diharapkan masyarakat tidak kunjung tiba, sehingga penderitaan rakyat kepulauan Riau semakin parah. Sementara hasil produksi mereka diambil alih oleh PT Karkam begitu saja, tanpa ada perhitungannya. Dilain pihak kebutuhan pokok mereka tidak dapat didapatkannya.

Sehubungan dengan kondisi ini pemerintah daerah menyampaikan harapan kepada pemerintah pusat agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi kesulitan yang dihadapi oleh seluruh rakyat Kepulauan Riau. Pemerintah Pusat diminta untuk mengirimkan bahan-bahan pokok kebutuhan keperluan sehari-hari dan menyalurkan hasil produksi masyarakat. Menghadapi hal itu Pemerintah Pusat mencoba membuat jalur perdagangan baru yaitu antara Indonesia, Muangthai, Philipina dan Jepang. Hal tersebut ditempuh terutama untuk menunjang blokade ekonomi yang sedang dilakukan terhadap Singapura. Dalam situasi perang seperti itu maka yang mencoba menentang pemerintah RI akan ditindak dengan tegas bahkan kalau perlu dengan kekerasan. Saat itu daerah Kepulauan Riau juga dijadikan basis militer untuk menghadapi Singapura dan Malaysia. Sehubungan dengan itu banyak kesatuan tentara yang sebagian besar sukarelawan ditempatkan hampir di seluruh pulau di daerah Kepulauan Riau. Sehingga suasana waktu itu amat mencekam. Situasi semacam itu membuat daerah Kepulauan Riau seperti daerah yang sedang dilanda peperangan besar, sehingga terkesan keamanan tidak terjamin dan rakyatpun hidup dalam ketakutan serta kesulitan. Para sukarelawan yang merupakan anggota kesatuan-kesatuan militer itu pada umumnya berada di sekitar pantai seperti Tanjungpinang, Karimun, Belakang Padang, Batam, Lingga, Kundur, dan Pulau Tujuh. Bahkan di Bagan Siapi-api dan Selat

Panjang daerah Bengkalis. Pada umumnya mereka turut mengorganisasi perdagangan illegal ke Singapura dengan menggunakan orang-orang Tionghoa. Rakyat di pantai Kepulauan Riau dipaksa oleh sebagian sukarelawan untuk menjual hasil perkebunan karetinya kepada pedagang Tionghoa yang dilindungi. Bagi yang melakukan perlawanan mereka dianggap kontra revolusi dan tidak sedikit yang dianiaya karena niat itu. Selain itu rakyat Kepulauan Riau juga dilarang mendengarkan siaran radio Singapura dan Malaysia. Saat itu ada beberapa anggota kesatuan yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara menjadi pelindung pedagang Tionghoa. Namun dilain pihak mereka sendiri melaksanakan perdagangan illegal (menyelundup) ke Singapura. Orang-orang tidak bertanggung jawab ini membawa keperluan sehari-hari masyarakat dari Singapura untuk mereka jual dengan harga dua kali lipat dari harga belinya di Singapura. Umumnya mereka bekerjasama dengan para pemilik toko yang kebanyakan orang Tionghoa. Tentu saja hal ini sangat menyulitkan aparat bea cukai sebagai pengawas blokade ekonomi terhadap Singapura.

Namun ternyata masyarakat Kepulauan Riau juga tidak tinggal diam, banyak juga diantara mereka yang tetap menjual karet ke Singapura dengan jalan illegal (menyelundup). Hal itu terjadi terutama karena karet di Kepulauan Riau tidak ada lagi pembelinya. Dalam perdagangan illegal ini biasanya menggunakan alat tukar dollar Singapura. Memang itulah yang mereka harapkan, karena apabila mereka membeli kebutuhan pokok sehari-hari di Singapura atau Malaysia tetap menggunakan uang dollar.

Dalam kondisi ini banyak para pekerja perkebunan dan tukang pajak kebun rakyat diberhentikan. Pada umumnya mereka ini adalah para perantau dari Jawa, sehingga mereka sebagian besar pulang ke daerahnya. Bahkan diantaranya ada yang menjual tanah atau pekarangan untuk sekadar pulang ke kampungnya. Ternyata hal ini menimbulkan pengaruh tersendiri bagi masyarakat Kepulauan Riau sebab mereka

biasanya mendapatkan tambahan dari hasil pajak kebun karet. Disamping itu banyak perkebunan karet yang menggunakan tenaga dari perantau Jawa.

Melihat kenyataan ini, pemerintah daerah mengambil langkah-langkah antara lain rakyat dibatasi dalam membeli kebutuhan pokok terutama beras dan gula dengan cara menggunakan kupon. Satu kupon dapat digunakan untuk membeli beras seberat 5 kg dalam jangka satu minggu. Hal ini tidak berlaku diseluruh daerah Kepulauan Riau tetapi terbatas pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian, pada 10 Nopember 1963 pemerintah mengeluarkan peraturan baru bagi daerah Kepulauan Riau, yaitu sejak saat itu daerah tersebut dimasukkan dalam daerah pabean Indonesia. Dengan pertimbangan bahwa sudah saatnya bagi Kepulauan Riau untuk memberikan andil pada income pemerintah. Sejak itu barang-barang tertentu yang masuk ke daerah Kepulauan Riau mulai dikenakan pajak. Namun untuk sementara tidak dikenakan pajak SWI (pajak wajib). Perdagangan dengan daerah-daerah lain di Pulau Sumatera pun tetap dikenakan pajak. Termasuk dalam hal ini bahan kebutuhan pokok seperti gula yang dikenakan KR.Rp 0,05 per kilogram sedang bensin, minyak tanah dan barang-barang sejenisnya dikenakan pajak sebesar KR. Rp 0,01 per liter.

Peraturan baru itu menyulitkan para pedagang, sebab sejak itu hasil-hasil bumi khususnya karet dari daerah lain di Pulau Sumatera sulit untuk masuk ke Kepulauan Riau. Demikian juga sebaliknya kebutuhan pokok dari Kepulauan Riau sulit masuk ke daerah-daerah tersebut. Padahal daerah-daerah lain di pulau Sumatera tersebut belum dapat mencukupi sendiri kebutuhan pokoknya. Sebelum daerah-daerah tersebut mengimpor dari Singapura atau Malaysia melalui Kepulauan Riau. Saat itu bahan pangan harganya sangat tinggi. Hal itu terjadi terutama akibat bertambah panjang jaringan perdagangan antara daerah-daerah tersebut dengan Singapura atau Malaysia. Demikian juga halnya dengan bahan sandang, yang biasanya diimpor dari Singapura tidak dapat dilakukan lagi. Rakyat

menjadi kekurangan sandang, walaupun ada harganya sangat mahal sehingga tidak terbeli oleh masyarakat.

Disisi lain, sejalan dengan politik konfrontasi, pemerintah Indonesia berusaha menasionalisasi seluruh badan usaha milik Malaysia dan Inggris yang kebanyakan berupa perkebunan yang berada di wilayah Riau. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan modal pada satu orang maupun beberapa orang saja. Akan tetapi sebenarnya tujuan utamanya adalah bersifat politis. Agar semua yang berkaitan dengan Malaysia dan Inggris dibekukan. Sebenarnya peraturan ini tidak begitu mempengaruhi masyarakat kepulauan Riau, sebab di daerah Kepulauan Riau tidak banyak badan usaha milik Malaysia dan Inggris. Walaupun ada hanya terbatas pada bidang perdagangan dan perkapalan. Pada masa itu nelayan dan buruh nekayan Kepulauan Riau menerima nasib yang sama seperti yang dialami oleh petani karet. Karena kebijakan pemerintah RI itu hasil tangkapan para nelayan tidak laku sebab para taoke tidak bersedia membelinya lagi. Nasib para buruh nelayanpun sangat menyedihkan. Mereka banyak diberhentikan, karena para taoke menghentikan usahanya. Berbeda dengan nelayan tradisional mereka masih tetap melakukan aktifitasnya. Mereka tidak kehilangan pangsa pasarnya yaitu pasar-pasar lokal di kota-kota pelabuhan. Sedangkan masyarakat Pulau Tujuh mencoba memasarkan hasil produksinya, seperti ikan, cengkih, lada, dan kelapa ke daerah di Kalimantan Barat dan sekitarnya.

Setelah kebijakan moneter Oktober 1963 itu berlangsung kurang lebih 10 bulan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan pematokan rupiah khusus di Kepulauan Riau. Keputusan pemerintah itu diambil berdasarkan sidang terbatas Presidium Kabinet Kerja Menteri Koordinator Departemen Keuangan, Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Urusan Anggaran Negara. Dalam rangka usaha pemerintah untuk mencapai satu macam uang rupiah yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia maka diputuskan bahwa di daerah tingkat II Kepulauan Riau sudah

tiba saatnya untuk diberlakukan satu mata uang rupiah seperti yang berlaku didaerah RI lainnya.

Selanjutnya untuk memasyarakatkan mata uang rupiah Indonesia, pemerintah mulai menetapkan pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan militer serta pensiunan yang berada di kawedanan Tangjungpinang, Lingga, Karimun, dan Pulau Tujuh dengan mata uang rupiah yang berlaku seperti di daerah-daerah lain di Indonesia.

Lebih dari itu, pemerintah juga mengeluarkan pemungutan bea-bea, cukai-cukai dan SWI (Sumbangan Wajib Istimewa) di daerah Kepulauan Riau berlaku sama seperti di daerah pabean Indonesia lainnya. Ini artinya di Kepulauan Riau diberlakukan pabean yang sama seperti daerah lainnya di Indonesia.

5.3 Pencabutan Kebijakan Moneter

Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, setelah kebijakan moneter Oktober 1963, di Kepulauan Riau berlangsung 10 bulan, maka pada 1 Juli 1964 secara resmi dicabut dengan dikeluarkannya penetapan Presiden RI No. 3 tahun 1964 tentang satuan uang rupiah yang berlaku di daerah Kepulauan Riau.

Maka terhitung mulai tanggal 1 Juli 1964 itu, dinyatakan berlakunya mata uang yang sah di daerah Kepulauan Riau sebagai berikut: 1) uang kertas Bank Indonesia yang kini berlaku di daerah Republik Indonesia di luar daerah Propinsi Irian Barat dan daerah tingkat II Kepulauan Riau, 2) uang kertas yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan yang lain berlaku di daerah Republik Indonesia di luar daerah Propinsi Irian Barat dan daerah tingkat II Kepulauan Riau, 3) uang logam yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan yang lain berlaku di daerah Republik Indonesia di luar daerah Propinsi Irian Barat, dan daerah tingkat II Kepulauan Riau (Penetapan Presiden RI No. 3 tahun 1964).

Untuk merealisasikan kebijaksanaan moneter 1 Juli 1964 maka tanggal 12 Juli 1964 pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden tentang Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Militer dengan menggunakan mata uang Rupiah seperti yang berlaku di daerah lain di wilayah Republik Indonesia. Keputusan yang sama yang juga berlaku bagi pensiunan pegawai negeri sipil dan ABRI.

Untuk melengkapi peraturan Pemerintah itu, selanjutnya pemerintah mengeluarkan penjelasan UU No. 7 tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-bea, Cukai-cukai dan SWI di daerah Kepulauan Riau. Langkah-langkah ini diambil dalam rangka upaya pemerintah untuk melengkapi pengintegrasian daerah Kepulauan Riau secara ekonomi dengan daerah-daerah lain di Republik Indonesia di luar Irian Barat.

Lebih dari itu untuk melengkapi pengintegrasian secara ekonomi di atas dan sebagai usaha untuk menstabilkan keuangan dan perekonomian Kepulauan Riau perlu mengikutsertakan daerah ini dalam rangka menghasilkan sumbangan bagi perbendaharaan negara di bidang bea-bea, cukai-cukai dan SWI sebagaimana yang telah berlaku di daerah pabean Indonesia lainnya, kecuali Irian Barat. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 9 tahun 1963 tentang penanggungungan pelaksanaan bea-bea, cukai-cukai di Kepulauan Riau secara resmi dicabut. Hal ini berarti seluruh peraturan pemerintah yang mendukung kebijaksanaan moneter 15 Oktober 1963 di Kepulauan Riau juga turut dicabut, kecuali peraturan tentang memasukkan Kepulauan Riau ke dalam daerah pabean Republik Indonesia.

Pergantian mata uang di daerah Kepulauan Riau dari dollar Malaysia atau Singapura ke KR. Rp ini telah merubah status daerah Kepulauan Riau yang sebelumnya dari segi kekuasaan masuk dalam wilayah Indonesia, namun dari segi ekonomi masih berada satu daerah dengan Singapura. Hal ini karena di antara kedua wilayah ini masih menggunakan satu mata uang yaitu dollar Malaysia atau Singapura. Ini telah berlangsung dari jaman Belanda sampai keluarnya kebijakan

moneter Oktober 1963. Sebagai upaya untuk memperlancar kebijakan moneter itu pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan sebagai pengatur dan menentukan status daerah tingkat dua Kepulauan Riau yang dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) pengganti UU No. 8 tahun 1963 tentang pemasukan daerah tingkat II Kepulauan Riau ke dalam daerah pabean Indonesia dengan tujuan untuk memperlancar “mendedolarisasikan” daerah tersebut. Peraturan Pemerintah itu juga dimaksudkan untuk mencapai kesatuan dan stabilisasi ekonomi nasional. Kebijakan ini ditetapkan pada 22 Oktober 1963. Namun diberlakukannya kebijaksanaan tersebut harga-harga barang semakin membumbung tinggi. Perdagangan ke luar negeri sangat sulit dilakukan, sementara perdagangan ke Singapura tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah.

Peraturan ini mengakibatkan perdagangan antara Kepulauan Riau dengan daerah lain termasuk daerah luar Sumatera dikenakan pajak. Hal ini memberatkan masyarakat sebab secara otomatis akan menaikkan harga barang yang didatangkan dari daerah lain termasuk daerah lain di Sumatera. Keadaan ini diperparah lagi dengan banyaknya pedagang Tionghoa yang tidak mau membeli karet rakyat. Akibatnya, banyak masyarakat daerah kepulauan Riau yang mengambil jalan pintas dengan melakukan perdagangan secara illegal ke Sumatera.

Pada saat itu di daerah pedalaman Kepulauan Riau terdapat suatu ikatan khusus yang telah dibangun sejak lama antara petani karet dan kelapa dengan pedagang. Pedagang perantara yang mereka kenal dengan sebutan tauke. Tauke-tauke inilah yang bertindak sebagai penyalur barang-barang produksi mereka. Pelaksanaannya saat itu masih dilakukan dengan sistem barter yaitu hasil produksi mereka ditukarkan dengan bahan kebutuhan pokok yang mereka perlukan. Para taukelah yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok itu. Disamping ditukarkan secara langsung barang-barang tersebut sebagian ada yang dibayar kemudian. Ini artinya peranan para tauke sama seperti tengkulak tetapi tidak ada penekanan harga sehingga tercipta timbal balik yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*).

Jaringan perdagangan yang terjadi di daerah Kepulauan Riau sangat dipengaruhi faktor geografis daerah ini yang sangat dekat dengan Singapura dalam kenyataannya untuk mengatur aktifitas perdagangan masyarakat di daerah ini dengan Singapura sangat sulit, karena pada umumnya masyarakat tetap melakukannya secara illegal. Jarak tempuh antara Kepulauan Riau dengan Singapura sangat singkat. Dengan menggunakan perahu boot para pedagang tersebut hanya memerlukan waktu kurang lebih setengah hari (6 jam) untuk mencapai Singapura. Para pedagang ini biasanya berangkat pada malam dan kembali ke Kepulauan Riau pada pagi harinya.

Seperti telah disebutkan di depan para pedagang Tionghoa sejak lama telah berperan sebagai perantara, mereka membeli hasil produksi rakyat dan sekaligus menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di kota-kota tetapi juga terjadi di pelosok-pelosok desa. Para pedagang Tionghoa yang ada di pelosok-pelosok desa ini merupakan perpanjangan tangan dari para pedagang besar yang ada di kota-kota. Dan para pedagang di kota ini merupakan kepercayaan dari pedagang yang lebih besar lagi (Tionghoa) di Singapura. Apabila ini diperhatikan jaringan sosial dan ekonomi semacam ini masih berlanjut terus hingga sekarang meskipun dalam cara yang berbeda.

Para pedagang Tionghoa yang berada di kampung-kampung dan menetap di situ bahkan ada yang menjalin hubungan perkawinan dengan penduduk setempat sehingga kedudukan mereka di kampung semakin kuat. Namun demikian hal ini tidak dibiarkan terus berlangsung. Untuk mengatasi ketergantungan rakyat kepada para pedagang Tionghoa pemerintah mengeluarkan PP No. 10 tahun 1958 isi peraturan itu adalah mengatur para pedagang Tionghoa agar tidak melakukan aktifitas perdagangan di tingkat kampung-kampung. Para pedagang Tionghoa hanya boleh melakukan aktifitas perdagangan di kota-kota kabupaten ke atas. Semenjak itu para pedagang Tionghoa yang berada di kampung-kampung mulai pindah ke kota-kota kabupaten.

Namun kenyataannya peraturan itu tidak dapat diterapkan di seluruh daerah Kepulauan Riau. Karena pada daerah-daerah tertentu pemerintah terlebih dahulu harus mempersiapkan pedagang pribumi atau badan-badan lain yang dapat menggantikan fungsi dan peranan pedagang Tionghoa tersebut. Hal itu dimaksudkan agar kelangsungan kesejahteraan rakyat tidak menjadi goncang (Lutfi, 1977: 632-633).

Sebagai gambaran yang nyata adalah Abdullah bukan nama sebenarnya yang saat ini telah berusia 63 tahun dia adalah mantan guru SMP dan Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau. Ketika peneliti meminta untuk berceritera tentang “jaman dollar”, dia nampak sangat bergairah. Kemudian, dia mulai dengan latar belakang dirinya sebagai pegawai negeri. Dia mulai menceritakan dengan mengatakan bahwa kalau ada pegawai negeri yang digaji dengan mata uang asing, maka hanya di Tanjungpinang. Sampai-sampai kota ini sudah dijuluki sebagai “surga dollar”. Kehidupan pegawai negeri di Tanjungpinang, ketika itu (tahun 1957--1963), dapat dikatakan sangat sejahtera. Bagaimana tidak? Seorang guru SMP seperti dia bisa menerima gaji 800 dollar Singapura, atau sekitar dua juta rupiah. Sehingga gaji selalu berlebih setiap bulannya. Sebagai ukuran untuk kebutuhan makan seluruh keluarganya dia hanya menghabiskan 5 sen setiap hari. Seluruh kebutuhan pokok dan tambahan lainnya terasa sangat mudah ia dapatkan. Hampir seluruh kebutuhan pokok yang dikonsumsi keluarganya adalah barang impor. Bahkan, pakaian sehari-hari pun ia menggunakan pakaian merk-merk terkenal. Pendeknya seluruh perlengkapan yang dikenalnya adalah barang-barang impor yang berkualitas tinggi.

Di sisi lain, kenangnya, pada masa itu belum dikenal adanya kolusi dan korupsi di jajaran pegawai negeri. Apalagi guru-guru dengan kondisi yang demikian, mereka dapat berkonsentrasi penuh dalam melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga Tanjungpinang dikenal sebagai kota yang mampu memberi pendidikan yang bermutu tinggi.

Akan tetapi, sebutan “surga dolar” tidak bertahan lama. Runtuhnya, masa keemasan ini diawali dengan pecahnya konfrontasi antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Ketika itu Singapura bergabung dalam Federasi Malaysia. Akibat keretakan hubungan ini membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan dedolarisasi. Mata uang dolar yang semula beredar diganti dengan rupiah Kepulauan Riau (KR.RP).

Oleh karenanya, semenjak 15 Oktober 1963 semua mata uang dolar Singapura/Malaysia yang beredar di Tanjungpinang ditarik dan diganti dengan KR.RP dengan nilai tukar 1 : 1. Ketika terjadi dedolarisasi, kurs antara KR.RP dengan rupiah adalah KR.RP 3,0 setara dengan 1000,-.

Konfrontasi merupakan awal masa pahit bagi masyarakat Tanjungpinang, karena hari ke hari harga-harga semakin melangit, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat semakin sulit didapat. Hubungan dagang dengan pasar utamanya, Singapura praktis tertutup. Produksi masyarakat tidak bisa dijual, sedangkan bahan kebutuhan pokok yang semula didatangkan dari Singapura, sudah tidak bisa diperoleh lagi. Kebutuhan pokok harus didatangkan dari Pekan Baru, atau daerah lainnya di Indonesia dengan harga yang tergolong mahal. Pada masa itu keadaan ekonomi Tanjungpinang mengalami kelesuan yang amat parah, sehingga dapat dikatakan Tanjungpinang telah berubah menjadi kota mati. Kemudian, keadaan itu mulai berangsur-angsur membaik, setelah masa konfrontasi berakhir dan hubungan dengan Singapura kembali normal.

Sementara itu, informasi yang lain mengatakan bahwa pada masa dolar Malaysia di Kepulauan Riau, daerah ini menjadi primadona yang diminati banyak orang. Banyak orang yang mengorbankan beberapa bulan gajinya asalkan bisa dipindahkan ke Tanjungpinang. Alasannya, dengan standar pendapatan dolar Malaya orang tersebut dapat hidup di daerah Kepulauan Riau lebih dari cukup, dan bahkan, dapat dikatakan mewah. Sangat berbeda dengan kehidupan di daerah lainnya di Indonesia.

Menurutnya, ukuran kemakmuran itu dapat dilihat dari statistik kamtibmas di suatu daerah. Dikisahkan, bila pada malam hari ada pintu atau jendela rumah yang lupa tidak terkunci di daerah tersebut, dapat dipastikan tidak akan ada maling yang menggerayangi. Demikian juga ada barang berharga yang tertinggal di luar rumah, baik siang maupun malam, seperti sepeda motor atau sepeda apalagi kain jemuran, yang pasti akan tetap ada ditempatnya sampai keesokan harinya atau bahkan sampai kapanpun. Bila hal itu terjadi di suatu daerah dapat dipastikan daerah tersebut merupakan daerah yang makmur.

Harga kebutuhan pokok dan segala jenis kebutuhan rumah tangga lainnya sangat murah, terutama jika dibandingkan dengan harga di wilayah lain di Indonesia waktu itu. Sehingga wajarlah apabila daerah Kepulauan Riau ini menjadi daerah idaman banyak orang pada waktu itu.

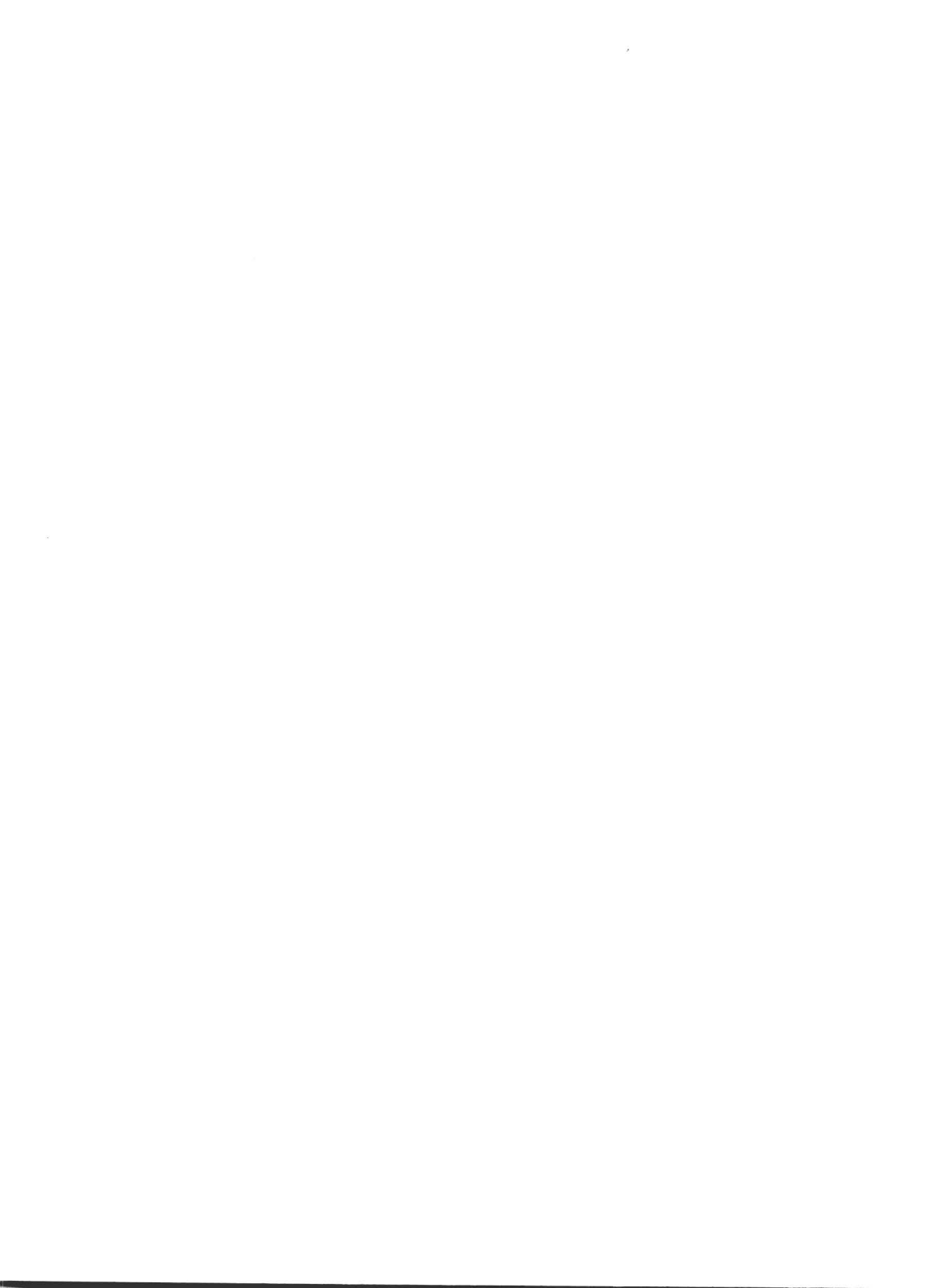
Akan tetapi, untuk datang ke daerah ini tidaklah semudah yang diperkirakan orang. Karena daerah Kepulauan Riau pada waktu itu adalah daerah "tertutup". Untuk datang ke sini diperlukan surat khusus, sama seperti memasuki Singapura dan Malaysia sekarang. Harus ada yang menjamin apalagi bila yang bersangkutan tidak membawa uang, untuk biaya transpor kembali serta untuk keperluan sehari-hari.

Akan tetapi, semenjak konfrontasi tahun 1963, membuat kehidupan di wilayah ini berubah secara drastis. Bagi penduduk yang sudah terbiasa hidup dalam kemewahan tentu sangat kebingungan. Semua kemewahan seolah lenyap seketika disapu badai konfrontasi. Seluruh kebutuhan hidup yang selama ini melimpah ruah seakan lenyap ditelan bumi. Sejak saat konfrontasi itu barang-barang mewah lenyap dari seluruh toko dan pasar. Sehingga seluruh kebutuhan hidup didatangkan dari propinsi lain, seperti Sumatera Barat, Jambi, dan Medan. Kendati mutu barang dalam negeri ini jauh di bawah mutu barang-barang luar negeri, namun harga sangat tinggi. Akibatnya, berbagai penyelundupan tak terhindari lagi. Berbagai bentuk bahan mentah, seperti hasil laut, hasil hutan,

dan hasil bumi lainnya di kepulauan Riau diselundupkan ke Singapura. Sebaliknya, dari Singapura diselundupkan barang-barang mewah ke Kepulauan Riau. Untuk mencegah penyelundupan ini perbatasan laut di kepulauan Riau dijaga oleh pihak keamanan Indonesia.

Setelah konfrontasi bumi Riau berubah status. Walaupun proses perubahannya memakan waktu yang cukup lama. Sebelum penggantian mata uang dolar ke rupiah terjadi, didahului dengan masa peralihan. Pada masa peralihan ini, mata uang yang berlaku di daerah Kepulauan Riau adalah KRARP (Kepulauan Riau Rupiah). Dengan demikian apabila boleh menghitungnya, kemakmuran yang dinikmati masyarakat Kepulauan Riau ini setelah masa penyerahan kedaulatan, kira-kira hanya berlangsung sampai awal konfrontasi tahun 1963.

Lebih dari itu dikisahkan pula keadaan Kota Tanjungpinang pada masa dollar, keramaian dan kesibukan masyarakat di Tanjungpinang hanya terjadi pada saat-saat tertentu saja. Setelah lewat pukul 14.00 WIB Tanjungpinang sepi sekali, kebanyakan penduduknya beristirahat. Sore hari baru kehidupan dimulai kembali. Saat itu banyak orang muda berolah raga. Kemudian dilanjutkan malam sekitar pukul 19.00 sampai pukul 21.00 WIB sampai bioskop bubar. Setelah itu Tanjungpinang lelap dalam tidurnya. Hanya di laut saja terlihat kelap-kelip lampu namun juga tidak sesibuk sekarang. Bila menangkap ikan para nelayan harus berlayar sampai jauh ke tengah laut. Kehidupan nelayan pada waktu itu juga makmur hampir sama dengan penduduk lain. Ikan yang berhasil ia tangkap hari itu dapat membiayai hidup seluruh keluarganya selama dua hari. Menurutnya, barangkali dalam sejarah kehidupan nelayan di Indonesia, itulah yang termakmur. Dan, masa itu kini hanya tinggal kenangan.



BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan sejarah penduduk di ketiga kawasan (Singapura, Malaysia dan Riau) adalah serumpun, karena mereka sama-sama mengakui bahwa Nila Utama yang bergelar “Sri Tri Buana” yang datang dari Bukit Siguntang Mahameru di Palembang (Sriwijaya) adalah cikal bakal raja-raja Melayu Riau dan kawasan Semenanjung. Ini artinya, bahwa hubungan mereka telah terjadi sejak lama (ratusan tahun yang lalu). Oleh karena itu, Mubyarto (seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada) menggambarkan program pemerintah yang bernama “Sijori” yang kemudian ditingkatkan menjadi “IMS-GT” sebagai “pengembalian” hubungan ekonomi yang telah terjalin ratusan tahun.

Letak Selat Malaka yang demikian strategis, sebagai jalur lalu lintas pelayaran dunia pada gilirannya membuat bandar Singapura menjadi pelabuhan yang tidak hanya digunakan untuk membongkar dan atau memuat barang jasa, tetapi sebagai tempat persinggahan sementara (transit) kapal-kapal yang akan melanjutkan perjalanannya ke tempat lain.

Peranan bandar Singapura yang demikian itu, kemudian menjadi tujuan para pedagang untuk memasarkan barang dagangannya. Dan daerah paling dekat adalah Kepulauan Riau yang langsung berbatasan dengan Singapura. Faktor inilah yang membuat para pedagang dari Tanjungpinang dan daerah

sekitarnya berdatangan ke Singapura. Mereka kebanyakan keturunan Cina yang berperan sebagai pedagang perantara. Artinya, apa yang diperdagangkan baik hasil pertanian/perkebunan atau hasil laut (ikan) bukan dilakukan secara langsung. Mereka menampung dari para petani dan atau nelayan. Para petani menyebut penampung ini sebagai "touke".

Hubungan antara touke dengan petani dan atau nelayan lebih banyak bercorak ekonomi semata. Mereka memang memperhatikan kebutuhan dari petani dan atau nelayan, tetapi hal itu tidak lepas dari masalah ekonomi. Pinjaman barang dan atau uang akan diambil langsung dari hasil yang diterima oleh petani dan nelayan tadi. Malahan, ada kalanya touke menentukan harga secara sepihak, dan para petani dan atau nelayan tidak dapat berbuat banyak. Namun demikian, karena alat tukar yang digunakan adalah dollar yang nilainya lebih tinggi daripada rupiah, mereka tidak merasa kekuarangan. Bahkan, dapat dikatakan berkecukupan. Lebih-lebih bagi mereka yang mengusahakan karet dan cengkih, karena pada tahun 50-an sampai 60-an harganya melambung.

Sementara itu, para pengawai negeri juga tidak kalah makmurnya. Bagaimana tidak? Seorang guru SMP saja bergaji 800 dollar yang jika dirupiahkan menjadi Rp 2.000.000, suatu jumlah yang tidak sedikit pada saat itu. Namun, sejak diberlakukannya kebijakan moneter 15 Oktober 1963, lambat laun kehidupan masyarakat Kepulauan Riau tidak semakmur pada zaman dollar. Malahan, banyak mengalami kesulitan, terutama dalam memasarkan hasil pertanian/perkebunan dan laut. Kebijakan Oktober 1963 antara lain berisi pelarangan penggunaan mata uang asing (dolar) Malaysia dan Singapura. Dan ini artinya bahwa "zaman dollar" telah berakhir.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan sebagai akibat dari politik luar negeri akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Apalagi, dalam kasus ini orang-orang Malaysia dan Singapura dan orang-orang Kepulauan Riau secara sosial dan ekonomi menyatu. Hal itu, tidak saja dilihat dari latar belakang sejarah

tetapi juga dari mata uang yang digunakan. Namun, apapun yang terjadi yang penting adalah kecintaan terhadap tanah air mesti diutamakan.

Daftar Pustaka

- Arnoldt, H. *Perbankan di Indonesia*. Djakarta: Yayasan Obor, 1971.
- Abdullah, Taufik dan Abdulrachman Suriomihardjo (ed). *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Feith, Herbeth. *Pemikiran Politik Indonesia 1945--1965*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Hamidy, UU. *Perantau Jawa di Daerah Riau*. Pekanbaru: UIR Press, 1992.
- , *Indonesia Malaysia dan Singapura Dalam Pandangan Orang Melayu di Riau*. Pekanbaru: Zamrad, 1990.
- Ida Anak Agung Gde Agung. *Twenty Years Indonesia Foreign Policy*, The Haque: Mounon and co, 1971.
- Kuntowijoyo. *Sejarah Ekonomi Pedesaan: Masalah dan Teori*. Jakarta: Proyek IDSN, 1984.
- Kartodidjo, Sartono. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi; Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- , *Pendidikan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992.



Lutfi, Muctar, et al.ed. *Sejarah Riau*. Pekanbaru: Pemda Tk. I Riau, 1977.

Lembaran Negara RI No. 88, tahun 1963

Lembaran Negara RI No. 99, tahun 1963

Lembaran Negara RI No. 100, tahun 1963

Lembaran Negara RI No. 102, tahun 1963

Lembaran Negara RI No. 106, tahun 1963

Lembaran Negara RI No. 2625, tahun 1963

Lembaran Negara RI No. 63, tahun 1964

Lembaran Negara RI No. 67, tahun 1964

Lembaran Negara RI No. 68, tahun 1964

Mackie, J.A.C. *Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute 1963--1966*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Mubyarto. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1977

Muhammad, Noor, dkk. *Peranan Pasar Tradisional Pada Masyarakat di Daerah Riau*, Tanjungpinang: Proyek IDKD, 1990.

Soemargono, K (ed). *Profil Propinsi Indonesia: Propinsi Riau*, Jakarta: Yayasan Bakti Wawasan Nusantara, 1992.

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

1. Nama : H. Bakir, BA
Umur : 64 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Kakandep Dikbud Kepri
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto, Tanjungpinang
2. Nama : Raja Hj. Hatijah
Umur : 71 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Ka. Inspeksi Pendidikan di Kepulauan Riau
Alamat : Jl. Kemboja, Tanjungpinang
3. Nama : Drs. H. Abdul Rahman
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Kakandep Dikbud Kepri
Alamat : Jl. Jawa, Tanjungpinang
4. Nama : Kas Fernandes
Umur : 64 tahun
Pekerjaan : Mantan anggota DPRD Tk II Kepri dan Guru SMP
Alamat : Kampung Jawa, Tanjungpinang
5. Nama : Eddy Mawuntu
Umur : 60 tahun

- Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Jl. Matador, Tanjungpinang
6. Nama : H. Mukhsin Khalidi
Umur : 64 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Depdikbud Kab. Kepri
Alamat : Jl. Tugu Pahlawan, Tanjungpinang
7. Nama : Raja M. Asura
Umur : 65 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Guru dan mantan anggota DPRD
Kepri
Alamat : Jl. Teluk Kriting, Tanjungpinang



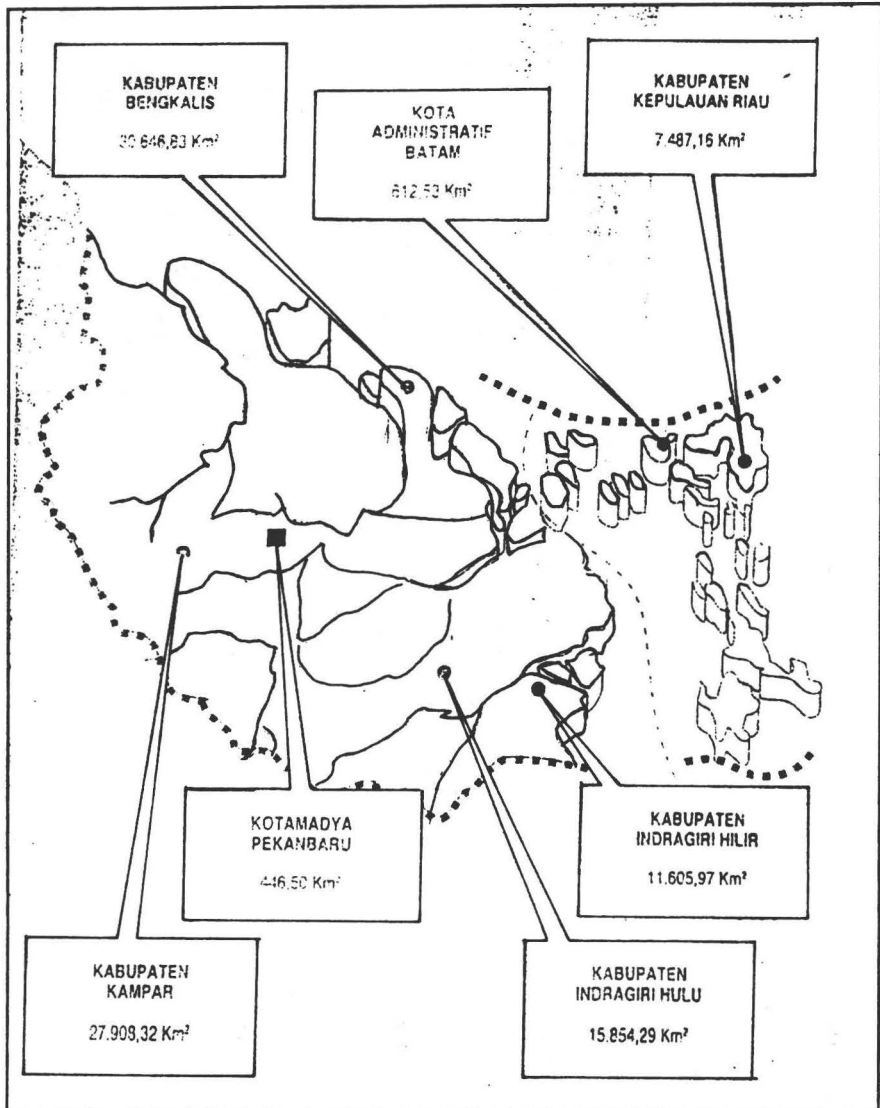
Contoh mata uang dolar dan mata uang rupiah pada masa tahun 1960 an



Contoh mata uang rupiah Kepulauan Riau

Sumber : Perum Peruri, Bank Notes And Coins From Indonesia 1945--1990, Jakarta 1992. Hlm. 195

PETA LUAS WILAYAH MENURUT DAERAH TINGKAT II



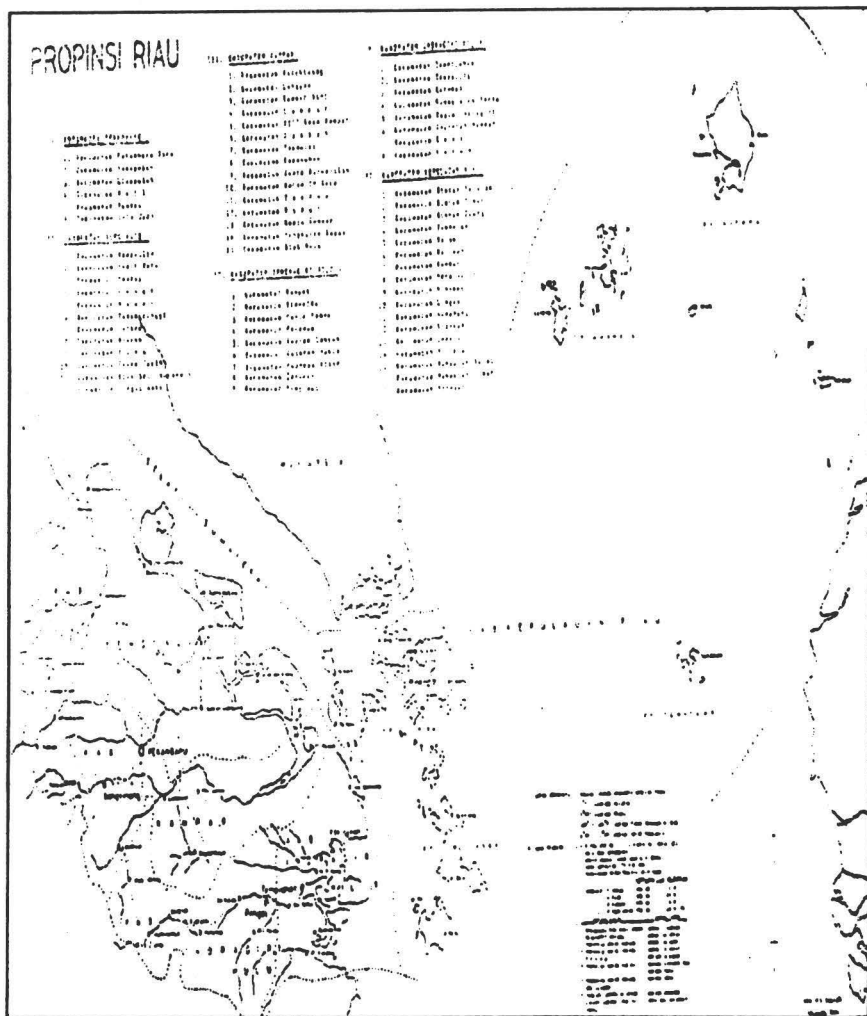
Sumber : Soemargono K. ed., Profil Propinsi Indonesia : Propinsi Riau, (Jakarta : Bhakti Wawasan Nusantara. 1992)

PETA PUSAT PERDAGANGAN



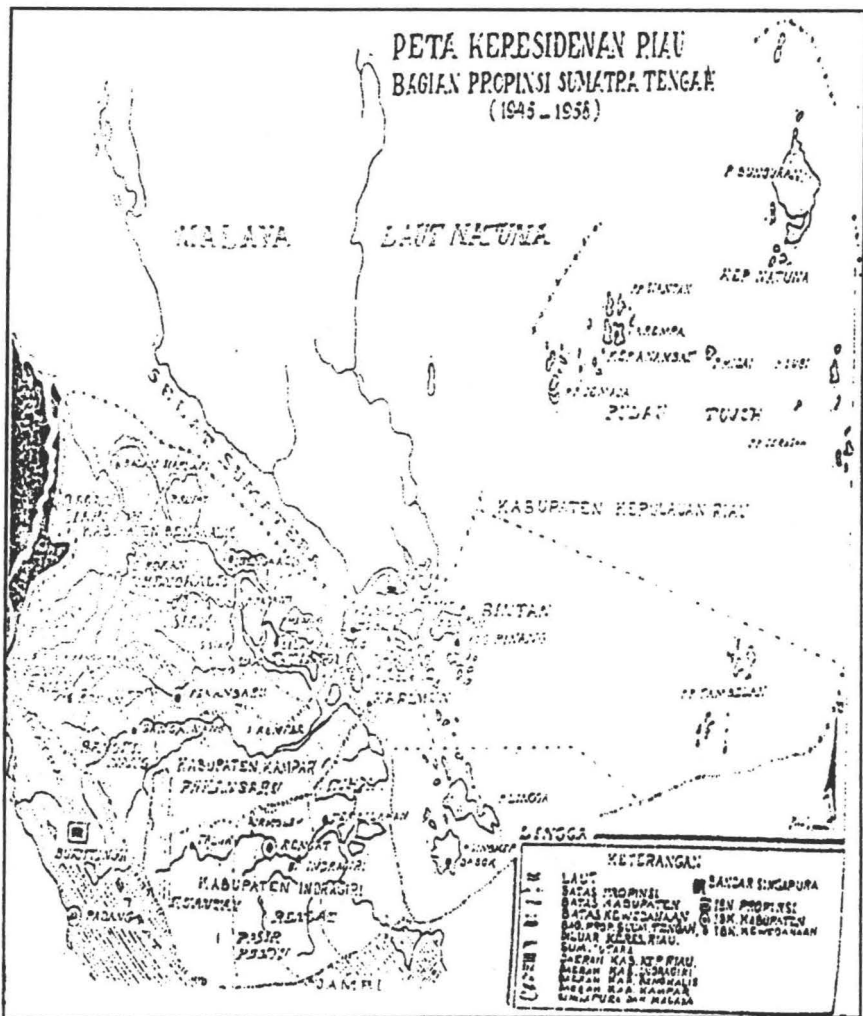
Sumber : Soemargono K. ed., Profil Propinsi Indonesia : Propinsi Riau. (Jakarta : Bhakti Wawasan Nusantara, 1992)

PETA PROPINSI RIAU

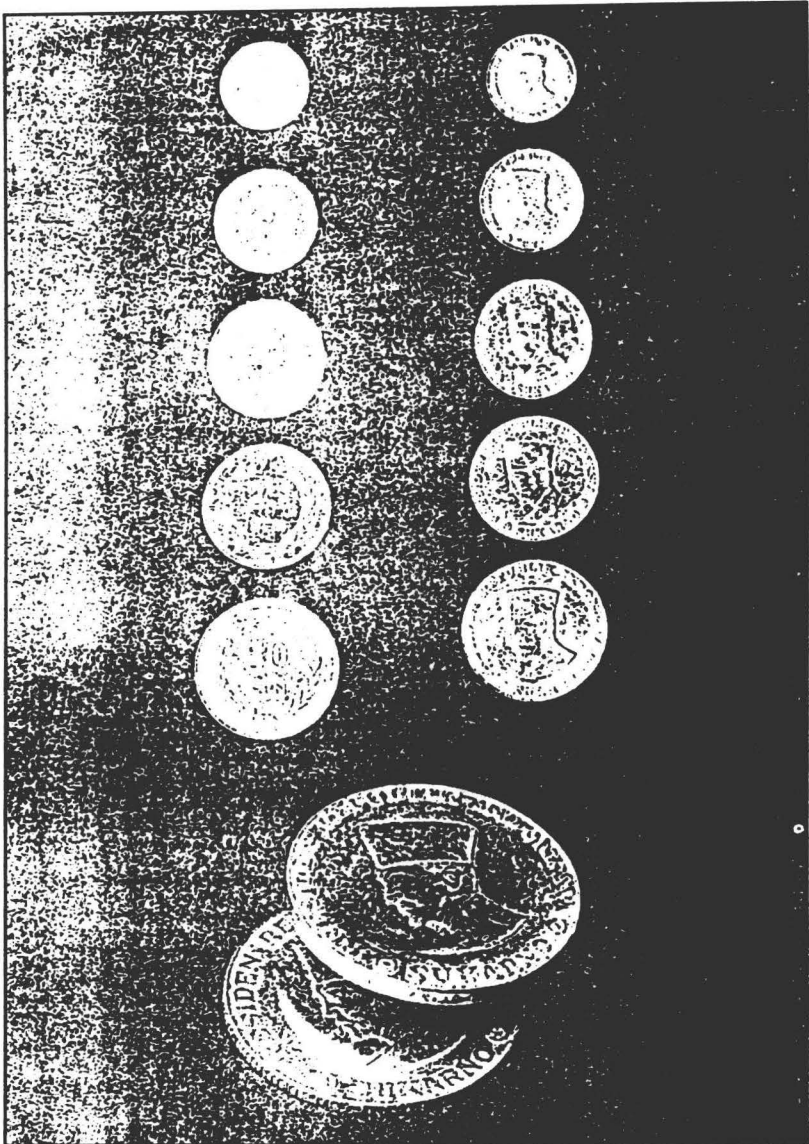


Sumber : Muktar Lutfi, et al, *Sejarah Riau*, (Pekan Baru : Percetakan Pekan Baru, 1977), hlm. 19

PETA KERESIDENAN RIAU



Sumber : Muktar Lutfi, et al, *Sejarah Riau*, (Pekan Baru : Percetakan Pekan Baru, 1977), hlm. 19



Contoh mata uang logam Republik Indonesia

Sumber : Perum Peruri, Bank Notes And Coins From Indonesia 1945--1990,
Jakarta 1992. Hlm, 195



Contoh uang rupiah (satu rupiah) yang dikeluarkan th 1964



Uang pecahan dua setengah rupiah tahun 1964

Sumber : Perum Peruri, Bank Notes And Coins From Indonesia 1945--1990, Jakarta 1992. Hlm, 195

